





PROFIL 2023

KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS II BANDUNG











KEMENTERIAN KESEHATAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT





KATA PENGANTAR



Kegiatan evaluasi yang dilaksanakan juga berdasarkan tugas pokok dan fungsi Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kelas II Bandung yang tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 33 tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan dan sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 1250/Menkes/SK/VIII/2005 tentang susunan jabatan dan uraian kegiatan Kantor Kesehatan Pelabuhan

dimana dalam menjalankan fungsinya, ketatausahaan di lingkungan KKP Kelas II Bandung harus mampu melakukan penyusunan program, pengelolaan informasi, evaluasi dan laporan.

KKP Kelas II Bandung berlokasi di Provinsi Jawa Barat mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pencegahan masuk dan keluarnya penyakit karantina, penyakit potensial wabah, surveilans epidemiologi, kekarantinaan, pengendalian dampak kesehatan lingkungan, pelayanan kesehatan pengawasan OMKABA serta pengamanan terhadap penyakit baru dan penyakit yang muncul kembali, bioterorisme, unsur biologi, kimia, dan pengamanan radiasi di wilayah kerja, bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat negara.

Berdasarkan Permenkes No 10 Tahun 2023 "Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekarantinaan Kesehatan" dan Peraturan Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit nomor OT.01.01/C/2174/2023 tentang tindak lanjut terbitnya Permenkes nomor 10 tahun 2023 Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Bandung berganti nama menjadi **Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Bandung** terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun 2024.

Bandung, Januari 2024 Kepala Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Bandung

dr. Sedya Dwisangka, M.Epid NIP 196901042002121003



DAFTAR ISI

KAT	A PE	ENGANTAR	i			
DAF	TAR	ISI	iii			
DAF	TAR	TABEL	v			
DAF	TAR	GRAFIK	vi			
DAF	TAR	GAMBAR	viii			
BAB	I PE	ENDAHULUAN	1			
A.	La	tar Belakang	1			
B.	<u> </u>					
	1.	Tujuan Umum	2			
	2.	Tujuan Khusus	2			
C.	Da	ta Umum Wilayah	2			
D.	Struktur Organisasi					
	1.	Sub Bagian Administrasi Umum	9			
	2.	Substansi Epidemiologi (PK&SE)	9			
	3.	Substansi Pengendalian Risiko Lingkungan (PRL)	9			
	4.	Substansi Upaya Kesehatan Dan Lintas Wilayah (UK&LW)	10			
	5.	Wilayah Kerja	10			
	6.	Kelompok Jabatan Fungsional	10			
BAB	II P	ENCAPAIAN KEGIATAN KKP KELAS II BANDUNG	12			
A.	Kegiatan Pengendalian Kekarantinaan dan Surveilans Epidemiologi					
	1.	Sumber Daya Manusia (SDM)	12			
	2.	Sumber Dana	12			
	3.	Pengamatan Epidemiologi Kesehatan Lalu Lintas Kapal dan Muatannya (ABK dan Penumpang) 12				
	4.	Pengamatan Epidemiologi Kesehatan Lalu Lintas Pesawat dan Muatannya Pesawat dan Penumpang)	•			
	5.	Surveilans Kesehatan Jemaah Haji Saat Embarkasi dan Debarkasi	23			
B.	. Kegiatan Upaya Kesehatan dan Lintas Wilayah					
	Peringatan Hari HKN ke 59 tahun 2023					
	2.	Pelayanan Kesehatan Terbatas Bandara Kertajati Majalengka	38			
	3.	Pelayanan Vaksinasi bagi Pelaku Perjalanan Internasional dan Vaksinasi (
C.	Ke	giatan Pengendalian Risiko Lingkungan (PRL)	41			

	1.	Pengendalian Tikus dan Pinjal	42
	2.	Pengendalian Vektor Nyamuk Aedes aegypti	45
	3.	Pengendalian Vektor Nyamuk Anopheles spp.	47
	4.	Pengendalian Vektor Lalat	47
	5.	Pengendalian Vektor Kecoa	49
	6.	Tempat Pengelolaan Pangan (TPP)	50
	7.	Pengawasan Sarana Air Bersih (SAB) dan Kualitas Air Bersih	52
	8.	Pengawasan Hygiene Sanitasi Bangunan Umum (HSBU)	53
	9.	Pengawasan dan Pemeriksaan Sanitasi Alat Angkut (Kapal dan Pesawat)	54
BAB	III D	UKUNGAN TEKNIS KKP KELAS II BANDUNG	80
A.	Ke	pegawaian	80
	1.	Distribusi PNS	81
	2.	Jabatan Fungsional	83
B.	Baı	ang Milik Negara	84
	1.	Barang Tidak Bergerak	84
	2.	Barang Bergerak	86
C.	Keı	uangan	87
	1.	Struktur Pengelola Keuangan	87
BAB	IV F	PENUTUP	92
LAMP	PIRA	.N	

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 2 Data Jemaah Calon Haji Wafat pada Saat Penyelenggaraan Embarka	si Haj
Embarkasi Jakarta-Bekasi Tahun 1444 H/2023 M	29
Tabel 2. 3 Hasil Kegiatan Penyelidikan Epidemiologi dalam Situasi KLB/Wabah	33
Tabel 3. 1 Alokasi Pegawai di Induk dan Wilker KKP Kelas II Bandung	81
Tabel 3. 2 Kuantitas Luas Tanah dan Bangunan berdasarkan lokasi	85
Tabel 3. 3 Jenis dan Jumlah Barang Bergerak di KKP Bandung	86
Tabel 3. 4 Jenis, Jumlah dan Lokasi Barang Bergerak di KKP Bandung	86

DAFTAR GRAFIK

Grafik 2. 1 Jumlah Kedatangan dan Keberangkatan Kapal KKP Kelas II Bandung 13
Grafik 2. 2 Jumlah Kedatangan dan Keberangkatan Kapal Wilayah Kerja KKP Bandung
Tahun 202114
Grafik 2. 3 Jumlah Kedatangan dan Keberangkatan Kapal dari Luar Negeri KKP
Bandung Tahun 202316
Grafik 2. 4 Jumlah Kedatangan dan Keberangkatan Kapal dari Dalam Negeri KKP Kelas
II Bandung Tahun 202217
Grafik 2. 5 Jumlah Kedatangan dan Keberangkatan ABK dari Luar Negeri Berdasarkan
Tempat KKP Kelas II Bandung Tahun 202318
Grafik 2. 6 Jumlah Kedatangan dan Keberangkatan Pesawat KKP Kelas II Bandung
Tahun 202319
Grafik 2. 7 Jumlah Kedatangan dan Keberangkatan Pesawat Berdasarkan Lokasi
Bandara di KKP Kelas II Bandung Tahun 202320
Grafik 2. 8 Jumlah Kedatangan dan Keberangkatan Pesawat21
Grafik 2. 9 Jumlah Kedatangan dan Keberangkatan Pesawat dari Dalam Negeri KKP
Kelas II Bandung Tahun 202321
Grafik 2. 10 Jumlah Kedatangan dan Keberangkatan Penumpang Pesawat KKP Kelas
II Bandung Tahun 202322
Grafik 2. 11 Distribusi Frekuensi Jemaah Calon Haji Berdasarkan Jenis Kelamin 25
Grafik 2. 12 Distribusi Frekuensi Petugas Haji Berdasarkan Jenis Kelamin
Grafik 2. 13 Distribusi Frekuensi Jemaah Calon Haji dan Petugas Haji Berdasarkan
Kelompok Umur Embarkasi Jakarta-Bekasi Tahun 1444 H/2023 M26
Grafik 2. 14 Distribusi Frekuensi Jemaah Calon Haji dan Petugas Haji27
Grafik 2. 15 Distribusi Frekuensi Jemaah Calon Haji dan Petugas Haji27
Grafik 2. 16 Distribusi Frekuensi Jemaah Calon Haji Berdasarkan Risiko Tinggi dan Non
Risiko Tinggi Embarkasi Jakarta-Bekasi Tahun 1444 H/2023 M28
Grafik 2. 17Distribusi Frekuensi Jemaah Calon Haji Risiko Tinggi Berdasarkan Jenis
Kelamin Embarkasi Jakarta-Bekasi Tahun 1444 H/2023 M28
Grafik 2. 18 Distribusi Frekuensi Jemaah Calon Haji dan Petugas Haji Berdasarkan
Status Kelaikan Terbang Embarkasi Jakarta-Bekasi Tahun 1444 H/2023 M
29

Grafik 2. 19 Distribusi Frekuensi Jemaah Calon Haji Berdasarkan Jer	nis Kelamin
Embarkasi Kertajati-Indramayu Tahun 1444 H/2023 M	30
Grafik 2. 20Distribusi Frekuensi Petugas Haji Berdasarkan Jenis Kelamim	Embarkasi
Kertajati-Indramayu Tahun 1444 H/2023 M	31
Grafik 2. 21Distribusi Frekuensi Jemaah Calon Haji dan Petugas Haji B	erdasarkan
Kelompok Umur Embarkasi Kertajati-Indramayu Tahun 1444 H/2	023 M 31
Grafik 2. 22 Distribusi Frekuensi Jemaah Calon Haji dan Petugas Haji 🛭 B	erdasarkan
Status Kelaikan Terbang Embarkasi Kertajati-Indramayu T	ahun 1444
H/2023 M	32
Grafik 2. 23 Pelayanan Kesehatan Terbatas di Bandar Udara Internasior	nal Kertajati
Tahun 2023	39
Grafik 2. 24 Jumlah Tikus Tertangkap di Wilker KKP Bandung	43
Grafik 2. 25 Index Pinjal di Wlilayah Kerja	45
Grafik 2. 26 House Index Memenuhi Syarat Wilayah Perimeter di Wilayah K	erja 46
Grafik 2. 27 Kepadatan Lalat Memenuhi Syarat di Wilayah Kerja	48
Grafik 2. 28 Indeks Kepadatan Kecoa Memenuhi Syarat di	50
Grafik 2. 29 Jumlah TPP di Wilayah Kerja	51
Grafik 2. 30 Jumlah SAB Risiko Rendah di Wilayah Kerja KKP Kelas II Band	dung Tahun
2021-2023	53
Grafik 2. 31 Jumlah TTU dengan hasil pemeriksaan baik di Wilayah Kerja K	KP Kelas II
Bandung Tahun 2021-2023	54
Grafik 2. 32 Pemeriksaan Alat Angkut di Bandara dan Pelabuhan	56

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Wilayah Kerja KKP Kelas II Bandung Tahun 2022	3
Gambar 1. 2 Kantor induk KKP Kelas II Bandung	4
Gambar 1. 3 Wilker Pelabuhan Cirebon	4
Gambar 1. 4 Wilker Pelabuhan Kejawanan	5
Gambar 1. 5 Wilker Pelabuhan Balongan dan Wilker Indramayu	5
Gambar 1. 6 Wilker Pelabuhan Ratu Sukabumi	6
Gambar 1. 7 Wilker Pelabuhan Laut Brebes	6
Gambar 1. 8 Pos Bandara Kertajati	7
Gambar 1. 9 Pos Bandara Husein	7
Gambar 1. 10 Pos Pelabuhan Patimban	8
Gambar 1. 11 Struktur Organisasi KKP Kelas II (Balai Kekarantinaan Kesehatan	Kelas
I) Bandung 2023 Error! Bookmark not de	efined.
Gambar 2. 1 Pemeriksaan Kapal	19
Gambar 2. 2 Pengawasan Kedatangan dan Keberangkatan Penumpang di Band	ara 23
Gambar 2. 3 Dokumentasi Kegiatan Surveilans Faktor Risiko Penyakit pada Ke	giatan
Piala Dunia U-17 di Stadion Si Jalak Harupat Kab. Bandung	36
Gambar 2. 4 Peringatan Hari HKN di Wilker Palabuhan Ratu	38
Gambar 2. 5Pelayanan Kesehatan di Pos Kesehatan Bandar Bandar	Udara
Internasional Kertajati Tahun 2023	40
Gambar 2. 6 Infografis Pelayanan Vaksinasi Tahun 2023	41
Gambar 2. 7 Pelaksanaan Pengendalian Tikus dan Pinjal	43
Gambar 2. 8 Kegiatan survey vektor jentik <i>Aedes</i>	46
Gambar 2. 9 Pemeriksaan Kepadatan Lalat	48
Gambar 2. 10 Kegiatan Survey dan Pengendalian Kecoa	49
Gambar 2. 11 Kegiatan Inspeksi Hygiene Sanitasi TPP	51
Gambar 2. 12 Kegiatan Pengawasan Sarana Air Bersih	52
Gambar 2. 13 Kegiatan Inspeksi Hygiene Sanitasi TTU	54
Gambar 2. 14 Pemeriksaan Sanitasi Pesawat dan Kapal	55
Gambar 2. 15 Pelaksanaan uji resistensi nyamuk <i>Aedes sp</i>	57
Gambar 2. 16 Pelaksaaan Implementasi Nyamuk Aedes Ber-Wolbachia	59
Gambar 2. 17 Pelaksanaan Pengendalian Faktor Risiko Lingkungan Piala Dunia	a U-17
	60

Gambar 2. 18 Surveilans Sentinel Leptospirosis di Jawa Barat							6		
Gamba	r 3.	1	Struktur	Pengelola	Keuangan	Kantor	Kesehatan	Pelabuhan	Kelas I
Bandung Tahun 2023						87			



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) sebagai unit pelaksana teknis (UPT), di lingkungan Kementerian Kesehatan RI, Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai amanat Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 33 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan. Tugas dan fungsi tersebut antara lain melaksanakan upaya cegah tangkalkeluar atau masuknya penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan di wilayah kerja pelabuhan, bandar udara, dan pos lintas batas darat negara.

Dengan diberlakukannya International Health Regulations (IHR) tahun 2005 maka semakin memperkuat posisi KKP sebagai salah satu instansi yang mempunyai kewenangan terhadap berbagai upaya kesehatan di pelabuhan dalam rangka pencegahan penyakit karantina dan penyakit menular potensi wabah yang masuk dan keluar dari pelabuhan, melaksanakan kekarantinaan dan pelayanan kesehatan terbatas di wilayah kerja pelabuhan/bandara dan lintas batas dan pengendalian terhadap dampak kesehatan lingkungan. Sehingga tujuan dan sasaran Kantor Kesehatan Pelabuhan dapat dilaksanakan dengan semaksimal mungkin, dengan mengadakan pengamatan epidemiologi, survei entomologi dan melakukan jejaring kerja baik secara vertikal maupun horizontal serta membina hubungan yang baik dengan Pemerintah Daerah setempat, sehingga apa yang telah diprogramkan dapat tercakup dengan memperoleh hasil yang memuaskan.

Profil merupakan grafik atau ikhtisar yg memberikan fakta tentang hal-hal khusus. Profil bertujuan memberikan gambaran/informasi kepada pembaca tentang kegiatan dan hasilnya pada tahun yang bersangkutan atau perbandingan/trend dengan tahun sebelumnya

Kegiatan evaluasi yang dilaksanakan juga berdasarkan tugas pokok dan fungsi KKP Kelas II Bandung yang tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 33 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan tentang susunan jabatan dan uraian kegiatan Kantor Kesehatan Pelabuhan. Dimana dalam menjalankan fungsinya, Subbagian administrasi umum mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana, dan hubungan masyarakat, pengelolaan data dan informasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, kearsipan, persuratan, dan kerumahtanggaan

Profil Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Bandung merupakan salah satu bentuk informasi kesehatan yang secara berkala diterbitkan setiap tahun untuk menggambarkan tentang perkembangan pembangunan bidang kesehatan di unit masing-masing. Maka dikembangkan suatu sistem informasi kesehatan yang salah satunya antara lain profil kesehatan. Yang mana dalam profil tersebut memuat semua data dan informasi dan program tentang kegiatan dan pencapaian kegiatan serta semua aspek yang mendukung ataupun yang menghambat proses kegiatan pembangunan kesehatan.

B. Tujuan

1. Tujuan Umum

Untuk memberikan gambaran, informasi dan data kepada pembaca latar belakang dan kondisi kegiatan tentang Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Bandung Tahun 2023.

2. Tujuan Khusus

Adapun tujuan khusus dalam penyusunan profil Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Bandung yaitu:

- a. Tersajinya gambaran, informasi dan data Pengendalian Karantina dan Surveilans Epidemiologi
- b. Tersajinya gambaran, informasi dan data Pengendalian Risiko Lingkungan
- c. Tersajinya gambaran, informasi dan data Upaya Kesehatan dan Lintas Wilayah
- d. Tersajinya mengetahui gambaran tentang ketatausahaan di Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Bandung

Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kelas II Bandung yang dulu bernama KKP Kelas II Cirebon terletak di Ibukota Provinsi Jawa Barat yaitu Kota Bandung. Tepatnya di Jalan Cikapayang No. 5 Kelurahan Tamansari Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung Jawa Barat 40116.

Provinsi Jawa Barat secara geografis terletak antara 5°50′ – 7°50° Lintang Selatan (LS) dan 104°48′ – 104°48° Bujur Timur (BT). Luas wilayahnya mencapai 34.816,96 km² yang terdiri atas 17 Kabupaten (Kab) dan 9 Kota. Ibukota Provinsi Jawa Barat adalah Kota Bandung. Sebagian besar wilayah Kab/Kota di Provinsi ini berbatasan dengan laut, sehingga Jawa Barat memiliki garis pantai cukup panjang, yaitu 755,83 km.

C. Data Umum Wilayah

Berdasarkan SK Menkes No. 2348 tahun 2011, terjadi perubahan induk KKP induk Cirebon, yang semula berkedudukan di Pelabuhan Laut Cirebon berpindah ke Bandara Husein Sastranegara Bandung, sehingga nama KKP menjadi KKP Kelas II Bandung. Secara resmi pada tanggal 09 April 2012, semua aktifitas pelaksanaan kegiatan induk terlaksana di Bandung.

KKP Kelas II Bandung mempunyai jangkauan pelayanan di beberapa Pelabuhan/ Bandara yang ada di Provinsi Jawa Barat (Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 2348/ Menkes/ Per IV/ 2011, tanggal 23 November 2011, Lampiran IV) yaitu meliputi Pelabuhan Cirebon Kota Cirebon, Pelabuhan Khusus Balongan Kabupaten Indramayu, Pelabuhan Indramayu Kabupaten Indramayu, Pelabuhan Pamanukan Kabupaten Subang, Pelabuhan Kejawanan Kota Cirebon, Pelabuhan Ratu Kabupaten Sukabumi, dan Pelabuhan Brebes Kabupaten Brebes, serta memiliki pos kesehatan bandara Husein Sastranegara Bandung, Bandara Internasional Kertajajati, dan Pelabuhan Patimban.



Gambar 1. 1 Wilayah Kerja KKP Kelas II Bandung Tahun 2022



Gambar 1. 2 Kantor induk KKP Kelas II Bandung



Gambar 1. 3 Wilker Pelabuhan Cirebon



Gambar 1. 4 Wilker Pelabuhan Kejawanan



Gambar 1. 5 Wilker Pelabuhan Balongan dan Wilker Indramayu



Gambar 1. 6 Wilker Pelabuhan Ratu Sukabumi



Gambar 1. 7 Wilker Pelabuhan Laut Brebes



Gambar 1. 8 Pos Bandara Kertajati



Gambar 1. 9 Pos Bandara Husein



Gambar 1. 10 Pos Pelabuhan Patimban

D. Struktur Organisasi

Struktur organisasi KKP Kelas II Bandung dipimpin oleh seorang Kepala Kantor dan dibantu oleh:

1. Sub Bagian Administrasi Umum

Sub Bagian Administrasi Umum dipimpin Kepala Sub Bagian Administrasi Umum yang mempunyai tugas melakukan :

- a. Koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran,
- **b.** Pengelolaan keuangan dan barang milik negara,
- c. Urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana, dan hubungan masyarakat,
- d. Pengelolaan data dan informasi,
- e. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan,
- f. Kearsipan, persuratan, dan
- g. Kerumahtanggaan

2. Substansi Epidemiologi (PK&SE)

Substansi Pengendalian Karantina dan Surveilans Epidemiologi dipimpin oleh Koordinator Substansi Pengendalian Karantina dan Surveilans Epidemiologi yang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan koordinasi pelaksanaan kekarantinaan, surveilans epidemiologi penyakit, penyakit potensial wabah, penyakit baru dan penyakit yang muncul kembali, pengawasan alat angkut dan muatannya, lalu lintas OMKABA, jejaring kerja, kemitraan, kajian serta pengembangan teknologi, pelatihan teknis bidang kekarantinaan dan surveilans epidemiologi di wilayah kerja pelabuhan, bandara dan lintas batas darat negara.

3. Substansi Pengendalian Risiko Lingkungan (PRL)

Substansi Pengendalian Risiko Lingkungan dipimpin oleh Koordinator Substansi Pengendalian Risiko Lingkungan yang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan koordinasi pelaksanaan pengendalian vektor dan binatang penular penyakit, pembinaan sanitasi lingkungan, jejaring kerja, kemitraan, kajian dan pengembangan teknologi serta pelatihan teknis bidang pengendalian risiko lingkungan di wilayah kerja pelabuhan, bandara dan lintas batas darat negara.

4. Substansi Upaya Kesehatan Dan Lintas Wilayah (UK&LW)

Substansi Upaya Kesehatan dan Lintas Wilayah dipimpin oleh Kepala Substansi Upaya Kesehatan dan Lintas Wilayah, yang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan koordinasi pelayanan kesehatan terbatas, kesehatan kerja, kesehatan matra, kesehatan haji, perpindahan penduduk, penanggulangan bencana, vaksinasi internasional, pengembangan jejaring kerja, kemitraan, kajian dan teknologi serta pelatihan teknis bidang upaya kesehatan di wilayah kerja pelabuhan, bandara dan lintas batas darat negara.

5. Wilayah Kerja

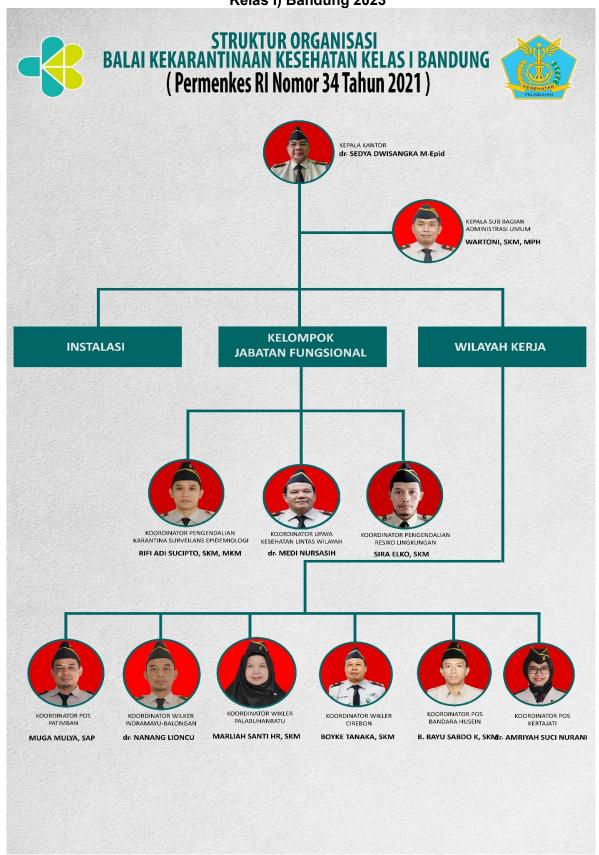
KKP Kelas II Bandung memiliki 7 (tujuh) Wilayah kerja dan 3 Pos yang masing – masing memiliki koordinator yaitu :

- a. Pelabuhan Cirebon : Boyke Tanaka, SKM
- b. Pelabuhan Indramayu : dr. Nanang Lioncu
- c. Pelabuhan Khusus Balongan : dr. Nanang Lioncu
- d. Pelabuhan Pamanukan Subang (tidak aktif)
- e. Pelabuhan Kejawanan Cirebon (tidak aktif)
- f. Pelabuhan Ratu Sukabumi : Marliah Santi HR, SKM
- q. Pelabuhan Brebes (tidak aktif)
- h. Pos Bandara Husein Sastranegara Bandung : Benedectus Bayu Sabdo Kusumo, SKM, MKM
- i. Pos Bandara Internasional Jawa Barat Kertajati Majalengka : dr. Amriyah Suci Nurani
- j. Pos Pelabuhan Patimban : Luki sumarto, SKM

6. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi atas berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya, serta dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala KKP.

Gambar 1. 11 Struktur Organisasi KKP Kelas II (Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I) Bandung 2023





BAB II

PENCAPAIAN KEGIATAN KKP KELAS II BANDUNG

A. Kegiatan Pengendalian Kekarantinaan dan Surveilans Epidemiologi

Substansi Pengendalian Karantina dan Surveilans Epidemiologi (PKSE) merupakan salah satu substansi di bawah Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Bandung untuk melakukan fungsi kekarantinaan dan surveilans epidemiologi di wilayah kerja bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat Negara. Dalam pelaksanaan kegiatannya, substansi PKSE secara rutin membuat profil tahunan yang merupakan salah satu bentuk informasi kesehatan untuk menggambarkan tentang pelaksanaan kegiatan kekarantinaan dan surveilans epidemiologi di pintu masuk Negara yang meliputi wilayah KKP kelas II Bandung. Pada profil tersebut memuat semua data dan informasi program substansi PKSE KKP Kelas II Bandung beserta pencapaian kegiatan, yang tertuang dalam bentuk gambar maupun grafik serta kegiatan yang dianggap memiliki daya ungkit.

1. Sumber Daya Manusia (SDM)

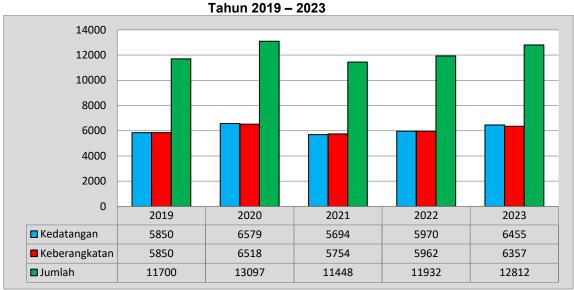
Sumber daya manusia yang melaksanakan kegiatan di substansi PKSE pada tahun 2023 terdiri dari 19 orang tenaga PNS.,1 orang tenaga PPNPN dan 1 orang tenaga outsoursching. Total 21 orang. Jabatan fungsional di tahun 2023 terdapat 19 orang terdiri dari EpidKes Ahli Madya 2 orang, EpidKes Ahli Muda 7 orang, EpidKes Ahli Pertama 2 orang, EpidKes Ahli Terampil 2 orang, EpidKes Ahli Mahir 2 orang dan Epidkes Ahli 3 orang serta terdapat PPNPN 1 orang dan tenaga outsourcing 1 orang

2. Sumber Dana

Sumber dana dalam melaksanakan kegiatan di substansi PKSE pada tahun 2022 berdasarkan DIPA Tahun 2022

3. Pengamatan Epidemiologi Kesehatan Lalu Lintas Kapal dan Muatannya (ABK dan Penumpang)

a. Pengawasan Kedatangan dan Keberangkatan Kapal



Grafik 2. 1 Jumlah Kedatangan dan Keberangkatan Kapal KKP Kelas II Bandung

Jumlah kedatangan dan keberangkatan kapal pada tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 7,3% dibandingkan tahun 2022. Sedangkan kedatangan dan keberangkatan kapal pada tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar 21,9% dibandingkan tahun 2021.

Dapat disimpulkan tahun 2023 terjadi peningkatan karena Pemerintah Indonesia secara resmi mencabut status Pandemi COVID-19 pada Rabu 21 Juni 2023 dengan menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 17 tahun 2023 tentang Penetapan Berakhirnya Status Pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) di Indonesia. Hal ini mengakibatkan adanya peningkatan bisnis dan perekonomian terutama pada pengangkutan barang lewat angkutan kapal laut. Peningkatan pemulihan kondisi perekonomian ini dijalani dengan protokol kesehatan yang baik

1) Pengawasan Kedatangan dan Keberangkatan Kapal Berdasarkan Wilayah Kerja



Grafik 2. 2 Jumlah Kedatangan dan Keberangkatan Kapal Wilayah Kerja KKP Bandung Tahun 2021

a) Wilker Cirebon

Jumlah kedatangan dan keberangkatan kapal pada tahun 2023 mengalami peningkatan 15% dibandingkan tahun 2022. Sedangkan kedatangan dan keberangkatan kapal 2022 mengalami peningkatan 7% dibandingkan tahun 2021. Adanya kenaikan di tahun 2023 disebabkan semenjak terdapatnya Keputusan Presiden Nomor 17 tahun 2023 tentang Penetapan Berakhirnya Status Pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) di Indonesia, maka aktifitas ekonomi kembali meningkat dan terbanyak kedatangan kapal ke wilayah cirebon membawa komoditas untuk perdagangan ataupun kebutuhan produksi seperti batu bara, pasir, tanah liat, aspal, gypsum, jagung, minyak sawit, dan garam.

b) Wilker Balongan

Jumlah kedatangan dan keberangkatan kapal pada tahun 2023 mengalami peningkatan 9,5% dibandingkan tahun 2022. Sedangkan kedatangan dan keberangkatan kapal tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 10,5% dibandingkan tahun 2021. Adanya kenaikan di tahun 2023 disebabkan semenjak terdapatnya Keputusan Presiden Nomor 17 tahun 2023 tentang Penetapan Berakhirnya Status Pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) di Indonesia, maka kebutuhan permintaan minyak ke daerah menjadi meningkat.

c) Wilker Pelabuhan Ratu

Jumlah kedatangan dan keberangkatan kapal pada tahun 2023 mengalami peningkatan 6,5% dibandingkan tahun 2022. Sedangkan kedatangan dan keberangkatan kapal pada tahun 2022 mengalami penururnan sebesar 1,4% dibandingkan tahun 2021. Adanya kenaikan di tahun 2023 disebabkan semenjak terdapatnya Keputusan Presiden Nomor 17 tahun 2023 tentang Penetapan Berakhirnya Status Pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) di Indonesia, maka kegiatan kebutuhan batu bara juga meningkat.

d) Wilker Indramayu

Jumlah kedatangan dan keberangkatan kapal pada tahun 2023 mengalami penurunan 10,4% dibandingkan tahun 2022. Sedangkan kedatangan dan keberangkatan kapal pada tahun tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar 6% dibandingkan tahun 2021. Adanya penurunan di tahun 2023 disebabkan karena pengaruh cuaca yang tidak baik dan kapal lebih banyak mengangkut ikan yang mana hasilnya mengalami penurunan serta adanya bisnis ke arah batu bara yang mengalami kekurangan pemasokan sehingga pengangkutan nya pun mengalami penurunan.

e) Pos Patimban

Jumlah kedatangan dan keberangkatan kapal pada tahun 2023 mengalami penurunan 10,4% dibandingkan tahun 2022. Sedangkan kedatangan dan keberangkatan kapal pada tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar 67,6% dibandingkan tahun 2021. Adanya kenaikan di tahun 2023 disebabkan semenjak terdapatnya Keputusan Presiden Nomor 17 tahun 2023 tentang Penetapan Berakhirnya Status Pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) di Indonesia, maka kegiatan komoditas kegiatan produksi meningkat seperti aktifitas pembangunan pengembangan Pelabuhan Patimban yakni meningkatnya kapal yang membawa bahan baku untuk pembangunan. Di samping itu terdapat peningkatan ekspor impor barang

h. Pengawasan Kedatangan dan Keberangkatan Kapal dari Luar Negeri



Grafik 2. 3 Jumlah Kedatangan dan Keberangkatan Kapal dari Luar Negeri
KKP Bandung Tahun 2023

Jumlah kedatangan kapal dari luar negeri pada tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 12,3% dibandingkan tahun 2022. Sedangkan tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 67,8% dibandingkan tahun 2021 Jumlah keberangkatan kapal dari luar negeri pada tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 26,6% dibandingkan tahun 2022. Sedangkan keberangkatan kapal dari luar negeri pada tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 82% dibandingkan tahun 2021.

Kegiatan pemeriksaan kapal dalam karantina dilaksanakan oleh tim boarding Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Bandung sesuai standar kekarantinaan pada setiap kedatangan. Kapal dinyatakan bebas karantina apabila setelah pemeriksaan memenuhi semua persyaratan dokumen yaitu Maritime Declaration of Health (MDH), Buku Kesehatan, Sertifikat SSCEC/SSCC, Crew list, Vaccination list, Sertifikat P3K/Medical Chest Certificate, Voyage memo, Ship Particular, dan General nil list.

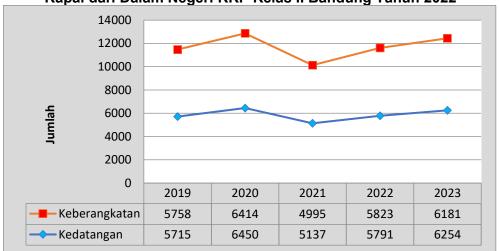
Sedangkan dari aspek kesehatan tidak ditemuinya adanya faktor risiko yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat (PHEIC). Setiap kapal yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana tersebut di atas kemudian diberikan Certificate of Pratique (COP) disertai penurunan bendera kuning (Q Flag) atau pemadaman lampu isyarat karantina pada malam hari.

Hasil pemeriksaan yang didapatkan berdasarkan instrumen yang ada, selama tahun 2023 tidak ditemukan adanya kapal yang membawa penyakit yang dapat menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat yang meresahkan dunia atau yang

disebut PHEIC. Semua kapal yang diperiksa berasal dari pelabuhan luar negeri sehat dan dapat diterbitkan Certificate of Pratique (COP).

c. Pengawasan Kedatangan dan Keberangkatan Kapal dari Dalam Negeri

Grafik 2. 4 Jumlah Kedatangan dan Keberangkatan Kapal dari Dalam Negeri KKP Kelas II Bandung Tahun 2022



Jumlah kedatangan kapal dalam negeri pada tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 8% dibandingkan tahun 2022. Sedangkan kedatangan kapal dalam negeri pada tahun tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar 12,7% dibandingkan tahun 2021.

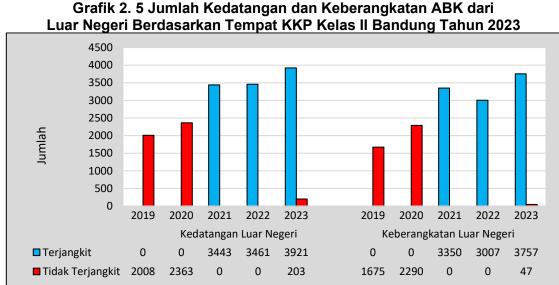
Sedangkan jumlah keberangkatan kapal dalam negeri pada tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 6% dibandingkan tahun 2022. Sedangkan keberangkatan kapal dalam negeri pada tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar 16,5% dibandingkan tahun 2021.

Kegiatan pengawasan kapal dari pelabuhan dalam negeri dilakukan dengan cara, nakhoda melalui agen pelayaran wajib melaporkan kedatangan kapal kepada Kantor Kesehatan Pelabuhan, dengan menyerahkan buku kesehatan, SSCEC/SSCC, Crew list, General Nil List, dan sertifikat P3K. Jika terdapat suatu laporan atau kecurigaan tentang kesehatan kapal maka petugas akan melakukan pemeriksaan/pengamatan secara langsung. Jika kedatangan kapal berasal dari pelabuhan dalam negeri terjangkit yang ditetapkan oleh kementerian kesehatan, maka kapal tersebut akan dilakukan pemeriksaan sesuai dengan standar kekarantinaan oleh tim yang ditunjuk oleh kepala kantor kesehatan pelabuhan

d. Pengawasan Lalu Lintas Anak Buah Kapal

Anak buah kapal merupakan salah satu yang memiliki faktor risiko yang paling rentan untuk terjadinya suatu penularan penyakit menular potensial wabah, maka sangat perlu dilakukan pengawasan/pemantauan

Jumlah kedatangan ABK kapal luar negeri dari daerah terjangkit pada tahun 2023 mengalami peningkatan 13,3% dibandingkan tahun 2022 karena masih dianggap pada tahun 2023 ini meskipun telah terdapat penetapan berakhirnya Status Pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) di Indonesia namun tetap merupakan wilayah yang diwaspadai kemungkinan terdapat lonjakan kasus covid19, sehingga ada beberapa Pelabuhan dianggap masih mempunyai risiko penularan Covid19 Total kedatangan ABK kapal dalam negeri dari daerah terjangkit sebanyak 3921 orang



Sedangkan jumlah keberangkatan ABK kapal luar negeri dari daerah terjangkit pada tahun 2023 mengalami peningkatan 25% dibandingkan tahun 2022. Pada kedatangan dan keberangkatan kapal luar negeri dari daerah tidak terjangkit masih terdapat beberapa daerah yakni sebanyak 47 pelabuhan. Total keberangkatan ABK kapal luar negeri dari daerah terjangkit sebanyak 3757 orang. Diharapkan tetap menjaga protokol kesehatan dengan baik dan peningkatan pengawasan Kesehatan

alat angkut kapal dan pelaku perjalanan



Gambar 2. 1 Pemeriksaan Kapal

- 4. Pengamatan Epidemiologi Kesehatan Lalu Lintas Pesawat dan Muatannya (Crew Pesawat dan Penumpang)
 - a. Pengawasan Kedatangan dan Keberangkatan Pesawat



Grafik 2. 6 Jumlah Kedatangan dan Keberangkatan Pesawat KKP Kelas II Bandung Tahun 2023

Jumlah kedatangan dan keberangkatan pesawat pada tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 1,8% dibandingkan tahun 2022. Sedangkan kedatangan dan keberangkatan pesawat pada tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar 26,3% dibandingkan tahun 2021. Penurunan kedatangan dan keberangkatan pesawat pada tahun 2023 terkait dengan ditutupnya operasional Bandara Husein Sastranegara di kota Bandung dan dipindahkan penerbangannya ke Bandara Kertajati Majalengka Jawa Barat mulai tanggal 29 Oktober 2023.



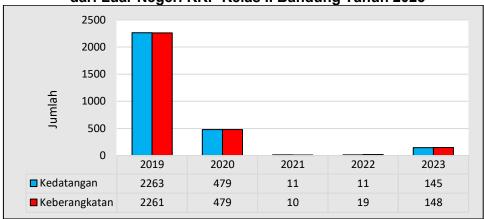
Grafik 2. 7 Jumlah Kedatangan dan Keberangkatan Pesawat Berdasarkan Lokasi Bandara di KKP Kelas II Bandung Tahun 2023

ke / dari Bandara Husein Sastranegara di tahun 2023 mencapai 6112 pesawat dan mengalami penurunan sebesar 6,4% dibanding tahun 2022. Sedangkan ke/dari Bandara Kertajati mencapai 1352 pesawat dan mengalami peningkatan sebesar 26,3% dibanding tahun 2021. Hal ini terkait dengan mulai beraktifitas kembali kegiatan bisnis di sektor swasta setelah terdapatnya Keputusan Presiden Nomor 17 tahun 2023 tentang Penetapan Berakhirnya Status Pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) di Indonesia. Kemudian Pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 48 tahun 2023 tentang Pengakhiran Penanganan Pandemi COVID-19. Di samping itu terdapatnya perpindahan aktifitas penerbangan dari Bandara Husein Sastranegara ke Bandara Kertajati Majalengka Jawa Barat, disertai kesiapan sejumlah moda transportasi yang mengantar jemput penumpang dari Bandung ke BIJB baik melintasi jalan tol Cipali atau Cisumdawu seperti bus Damri dengan harga terjangkau.

Berdasarkan grafik di atas, maka jumlah pesawat yang datang dan berangkat

1) Pengawasan Kedatangan dan Keberangkatan Pesawat dari Luar Negeri

Grafik 2. 8 Jumlah Kedatangan dan Keberangkatan Pesawat dari Luar Negeri KKP Kelas II Bandung Tahun 2023

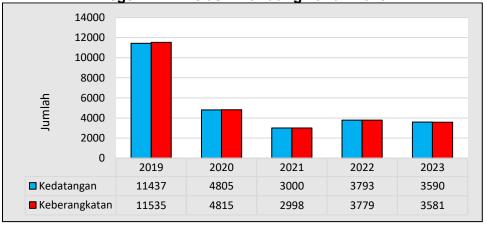


Berdasarkan gambaran grafik di atas, maka jumlah kedatangan pesawat dari luar negeri pada tahun 2023 sama dengan tahun 2022 yakni sebanyak 145 pesawat, mengalami peningkatan sebanyak 1218%. Sedangkan kedatangan pesawat dari luar negeri pada tahun 2022 sama dengan tahun 2021 yakni sebanyak 11 pesawat.

Sedangkan jumlah keberangkatan pesawat dari luar negeri pada tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 678% dibandingkan tahun 2022. Sedangkan keberangkatan pesawat ke luar negeri pada tahun tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar 90% dibandingkan tahun 2021.

2) Pengawasan Kedatangan dan Keberangkatan Pesawat dari Dalam Negeri

Grafik 2. 9 Jumlah Kedatangan dan Keberangkatan Pesawat dari Dalam Negeri KKP Kelas II Bandung Tahun 2023

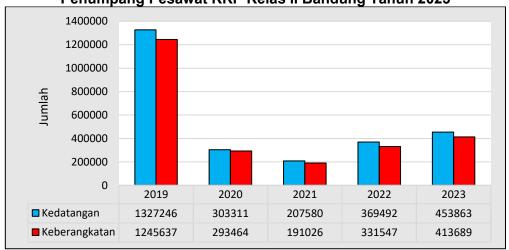


Jumlah kedatangan pesawat dalam negeri pada tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 5,3% dibandingkan tahun 2022. Sedangkan kedatangan pesawat dalam negeri pada tahun tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar 26,4% dibandingkan tahun 2021. Sedangkan jumlah keberangkatan pesawat

dalam negeri pada tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 5,2% dibandingkan tahun 2022. Sedangkan keberangkatan pesawat dalam negeri pada tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar 26% dibandingkan tahun 2021.

b. Pengawasan Lalu Lintas Penumpang Pesawat





Jumlah kedatangan penumpang pesawat pada tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 22,8% dibandingkan tahun 2022. Sedangkan jumlah kedatangan penumpang pesawat pada 2022 mengalami peningkatan sebesar 78% dibandingkan tahun 2021. Sedangkan jumlah keberangkatan penumpang pesawat pada tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 24,8% dibanding tahun 2022. Dan keberangkatan penumpang pesawat pada tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar 73,6% dibanding tahun 2021.

Banyaknya penumpang baik yang datang maupun yang berangkat seiring adanya peningkatan jumlah pesawat yang beroperasi di Bandara Kertajati Majalengka Jawa Barat.





Gambar 2. 2 Pengawasan Kedatangan dan Keberangkatan Penumpang di Bandara

5. Surveilans Kesehatan Jemaah Haji Saat Embarkasi dan Debarkasi

Sebagaimana diamanahkan dalam Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2008 Penyelenggaraan ibadah haji bertujuan untuk memberikan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan yang sebaik – baiknya bagi jemaah haji sehingga Jemaah haji dapat menunaikan ibadahnya sesuai dengan ketentuan ajaran agama Islam, dan untuk maksud tersebut pemerintah berkewajiban melakukan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan dengan menyediakan layanan administrasi, bimbingan ibadah haji, akomodasi, transportasi, pelayanan kesehatan, keamanan, dan hal-hal lain yang diperlukan oleh jemaah haji.

Kegiatan Penyelenggaraan Kesehatan Haji Embarkasi sudah menjadi kegiatan rutin setiap tahun, meskipun pada tahun 2020 dan 2021 sempat tidak diselenggarakan karena adanya Pandemi Covid-19. Akan tetapi penyelenggaraan ibadah haji kembali dilaksanakan pada tahun 2022 dengan kuota terbatas atau setengah dari kuota tahuntahun sebelumnya. Tahun ini penyelenggaraan ibadah haji 1444H/2023 M kembali dilaksanakan dengan kuota penuh dan mayoritasnya adalah lansia sehingga tema ibadah haji tahun ini adalah "Haji Ramah Lansia"

Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 62 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kesehatan Haji disebutkan bahwa, penyelenggaraan kesehatan haji bertujuan untuk :

- 1. Mencapai kondisi istitha'ah kesehatan jemaah calon haji
- 2. Mengendalikan faktor risiko kesehatan haji
- 3. Menjaga agar jemaah haji dalam kondisi sehat selama di Indonesia , selama di perjalan dan di Arab Saudi

- 4. Mencegah terjadinya transmisi penyakit menular yang mungkin terbawa keluar dan/atau masuk oleh jemaah haji
- 5. Memaksimalkan peran serta masyarakat dalam Penyelenggaraan Kesehatan Haji

Untuk mewujudkan tujuan tersebut, maka penyelenggaraan kesehatan haji di Indonesia dilaksanakan secara terpadu, menyeluruh dan berkesinambungan sejak pemeriksaan tahap pertama di puskesmas, tahap kedua di Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota, dan pemeriksaan kesehatan tahap ketiga di Embarkasi Haji. Pembinaan Kesehatan haji diselenggarakan secara terpadu, terencana, terstruktur, dan terukur melalui serangkaian kegiatan promotif dan preventif yang dimulai pada saat Jemaah calon haji mendaftar sampai kembali ke Indonesia. Tidak seperti persyaratan tahun sebelumnya, persyaratan calon jemaah haji 1444 H/ 2023 M lebih longgar yaitu tidak ada pembatasan usia dan tidak ada syarat PCR akan tetapi untuk vaksinasi Covid-19 dosis lengkap tetap menjadi persyaratan.

Tantangan pelayanan kesehatan haji setiap tahun terus berubah dan semakin bertambah, seperti meningkatnya jumlah jemaah calon haji risiko tinggi, latar belakang pendidikan, etnis dan sosial budaya yang beragam, serta kondisi fisik yang kurang prima, kondisi lingkungan di Arab Saudi yang berbeda secara bermakna dengan kondisi di tanah air, misalnya perbedaan musim (panas, dingin) dan kelembaban udara yang rendah, perbedaan lingkungan sosial budaya, keterbatasan waktu perjalanan haji dan kepadatan populasi jemaah haji pada saat wukuf maupun melontar jumrah. Hal tersebut dapat berdampak kurang baik terhadap kesehatan jemaah haji Indonesia. Oleh karena itu pelayanan kesehatan kepada jemaah haji perlu ditingkatkan terus menerus secara berkesinambungan dan sistematik.

Pengawasan Kedatangan dan Keberangkatan Jamaah Haji Embarkasi Jakarta-Bekasi (JKS)

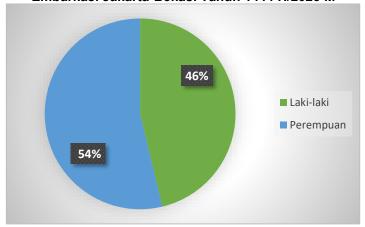
Kegiatan Penyelenggaraan Kesehatan Haji Embarkasi Jakarta-Bekasi Tahun 1444 H/ 2023 M periode pemberangkatan (embarkasi) dimulai pada tanggal 23 Mei 2023 sampai dengan 23 Juni 2023. Kegiatan yang dilakukan meliputi pemeriksaan kesehatan ketiga yaitu untuk menentukan kelaikan terbang jemaah calon haji, pengendalian karantina dan surveilans epidemiologi, pelayanan kesehatan di klinik asrama haji termasuk pemeriksaan laboratorium penunjang.

Setelah jemaah calon haji diterima oleh petugas PPIH Embarkasi Jakarta-Bekasi dilanjutkan dengan pemeriksaan dokumen kesehatan jemaah calon haji. Hasil pemeriksaan kesehatan jemaah calon haji tahap pertama dan kedua terekam dalam KKJH yang sudah di entri kedalam siskohatkes baik di tingkat Puskesmas dan Dinas

Kesehatan Kab./Kota, sedangkan pemeriksan ketiga/akhir dilakukan di asrama haji bekasi dengan melakukan validasi dokumen kesehatan yang dibawa jemaah calon haji. Adapun dokumen kesehatan tersebut adalah:

- 1) Berita acara Istitha'ah yang sudah di tanda tangani petugas kesehatan Kab/ Kota
- 2) KKJH (Kartu Kesehatan Jemaah calon haji)
- 3) Surat Keterangan telah dilakukan vaksinasi meningitis dan Covid 19 (dosis 1 &2)
- 4) Hasil pemeriksaan kehamilan terhitung 7 hari sebelum keberangkatan

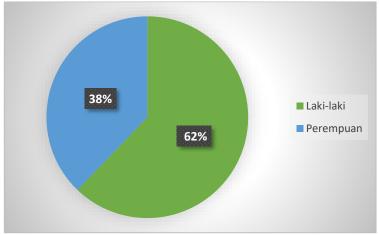
Validasi dokumen kesehatan yaitu kegiatan verifikasi /validasi hasil pemeriksaan kesehatan yang telah dilakukan di daerah masing-masing (kabupaten/kota), berlangsung rata-rata antara 45-60 menit. Pemeriksaan tahap ketiga ini dilaksanakan selama 32 hari, dengan jumlah jemaah calon haji dan petugas yang diperiksa secara keseluruhan sebanyak 30.893 orang. Terdiri dari 30.523 orang jamaah (laki-laki 14.123 orang dan perempuan 16.400 orang) dan 370 orang petugas (laki-laki 230 orang dan perempuan 140 orang), seperti terlihat pada grafik berikut:



Grafik 2. 11 Distribusi Frekuensi Jemaah Calon Haji Berdasarkan Jenis Kelamin Embarkasi Jakarta-Bekasi Tahun 1444 H/2023 M

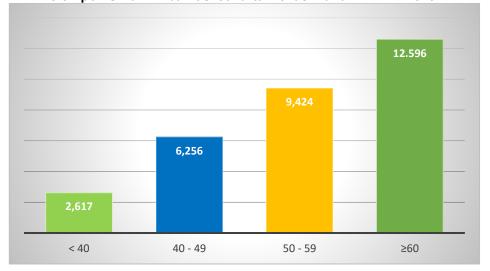
Dari grafik di atas dapat dilihat, Jemaah calon haji Jawa Barat di Embarkasi JKS didominasi oleh Jemaah Calon Haji perempuan yaitu sebanyak 54 % (16.400 orang) sedangkan jemaah calon haji laki-laki hanya 46% (14.123 orang).

Grafik 2. 12 Distribusi Frekuensi Petugas Haji Berdasarkan Jenis Kelamin Embarkasi Jakarta-Bekasi Tahun 1444 H/2023 M



Dari grafik di atas dapat dilihat, Petugas haji Jawa Barat di Embarkasi JKS didominasi oleh petugas laki-laki yaitu sebanyak 62 % (230 orang) sedangkan petugas haji perempuan hanya 38 % (140 orang).

Grafik 2. 13 Distribusi Frekuensi Jemaah Calon Haji dan Petugas Haji Berdasarkan Kelompok Umur Embarkasi Jakarta-Bekasi Tahun 1444 H/2023 M



Dari grafik di atas dapat dilihat, jemaah calon haji dan petugas haji Jawa Barat di Embarkasi JKS didominasi oleh kelompok umur ≥ 60 tahun yaitu sebanyak 12.596 orang (40,8 %) dan yang paling sedikit yaitu kelompok umur < 40 tahun yaitu sebanyak 2.617 orang (8,5 %) sehingga tema haji tahun 1444 H/2023 M yaitu "Haji Ramah Lansia" karena didominasi oleh lansia. Oleh karena itu dibutuhkan fasilitas pelayanan kesehatan yang lebih memadai bagi kelompok usia lanjut diantaranya kursi roda dengan jumlah yang memadai, obat - obatan yang sering dikonsumsi seperti obat DM, obat jantung, obat hipertensi, obat kolesterol, juga perlengkapan penunjang lansia

(seperti kantong pipis dan popok) serta dibutuhkan tenaga pendamping jamaah usia lanjut (seksi uzur) yang lebih banyak.

Bembarkasi Jakarta-Bekasi Tanun 1444 H/2023 M

Laki-laki
Perempuan

Grafik 2. 14 Distribusi Frekuensi Jemaah Calon Haji dan Petugas Haji Distribusi Frekuensi Petugas Haji Berdasarkan Jenis Kelamin Embarkasi Jakarta-Bekasi Tahun 1444 H/2023 M

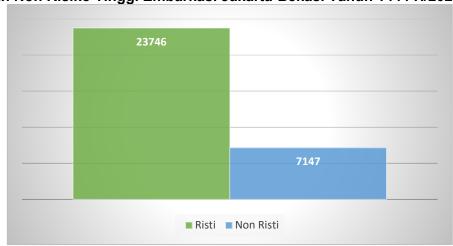
Dari grafik di atas dapat dilihat, Petugas haji Jawa Barat di Embarkasi JKS didominasi oleh petugas laki-laki yaitu sebanyak 62 % (230 orang) sedangkan petugas haji perempuan hanya 38 % (140 orang).



Grafik 2. 15 Distribusi Frekuensi Jemaah Calon Haji dan Petugas Haji Berdasarkan Kelompok Umur Embarkasi Jakarta-Bekasi Tahun 1444 H/2023 M

Dari grafik di atas dapat dilihat, jemaah calon haji dan petugas haji Jawa Barat di Embarkasi JKS didominasi oleh kelompok umur ≥ 60 tahun yaitu sebanyak 12.596 orang (40,8 %) dan yang paling sedikit yaitu kelompok umur < 40 tahun yaitu sebanyak 2.617 orang (8,5 %) sehingga tema haji tahun 1444 H/2023 M yaitu "Haji Ramah Lansia" karena didominasi oleh lansia. Oleh karena itu dibutuhkan fasilitas pelayanan kesehatan yang lebih memadai bagi kelompok usia lanjut diantaranya kursi roda

dengan jumlah yang memadai, obat - obatan yang sering dikonsumsi seperti obat DM, obat jantung, obat hipertensi, obat kolesterol, juga perlengkapan penunjang lansia (seperti kantong pipis dan popok) serta dibutuhkan tenaga pendamping jamaah usia lanjut (seksi uzur) yang lebih banyak.



Grafik 2. 16 Distribusi Frekuensi Jemaah Calon Haji Berdasarkan Risiko Tinggi dan Non Risiko Tinggi Embarkasi Jakarta-Bekasi Tahun 1444 H/2023 M

Dari grafik di atas dapat dilihat, Jemaah calon haji Jawa Barat di Embarkasi JKS didominasi oleh Jemaah calon haji dengan kategori risiko tinggi yaitu sebanyak 23.746 orang (76.9%) dan jemaah calon haji non risiko tinggi yaitu sebanyak 7.147 orang (23.1%). Hal ini disebabkan jemaah calon haji di dominasi oleh jamaah lanjut usia. Sehingga kesiapan TKHI dalam melayani jemaah calon haji kategori risiko tinggi tersebut harus lebih ditingkatkan, diantaranya dengan membawa perbekalan obat obatan yang cukup.



Grafik 2. 17Distribusi Frekuensi Jemaah Calon Haji Risiko Tinggi Berdasarkan Jenis Kelamin Embarkasi Jakarta-Bekasi Tahun 1444 H/2023 M

Dari grafik di atas dapat dilihat, Jemaah calon haji Jawa Barat di Embarkasi JKS dengan kategori risiko tinggi didominasi oleh jemaah calon haji perempuan yaitu

sebanyak 12.677 orang (53%) dan jemaah calon haji laki-laki sebanyak 11.069 orang (47%).

30879

LAIK TERBANG

TIDAK LAIK TERBANG

Grafik 2. 18 Distribusi Frekuensi Jemaah Calon Haji dan Petugas Haji Berdasarkan Status Kelaikan Terbang Embarkasi Jakarta-Bekasi Tahun 1444 H/2023 M

Dari tabel di atas dapat dilihat, jumlah Jemaah Calon Haji dan Petugas haji Jawa Barat di Embarkasi JKS yang dinyatakan laik terbang berjumlah 30.879 (99.96%) orang dan yang tidak laik terbang sebanyak 11 orang (0.04%).Berdasarkan Status Kelaikan Terbang.

Tabel 2. 1 Data Jemaah Calon Haji Wafat pada Saat Penyelenggaraan Embarkasi Haji Embarkasi Jakarta-Bekasi Tahun 1444 H/2023 M

				UM	UR	ASAL	PENYEBAB	TANGGAL
NO	NAMA CJH	NO. PORSI	KLT	L	P	DAERAH	KEMATIAN	DAN TEMPAT WAFAT
1	Iis Islamiyah, S.Pd Binti H Supendi	1000634105	JKS 021		57	Kab. Bogor	Infectious And Parasitic Diseases	03 Juni 2023/ RSUD Bekasi
2	Syamsuri Bin Prata Widodo	1000615003	JKS 017	63		Kota Bogor	Cardiovascular Diseases	04 Juni 2023/ RSUD Bekasi
3	Ahmad Bin Madtasim	1000651284	JKS 057	56		Kab. Bogor	Cardiovascular Diseases	15 Juni 2023/ Bandara Soeta

Dari tabel diatas dapat dilihat, jumlah Jemaah calon haji yang wafat pada saat penyelenggaraan Embarkasi Haji sebanyak 3 orang (1 orang Infectious And Parasitic Diseases dan 2 orang Cardiovascular Diseases).

b. Pengawasan Kedatangan dan Keberangkatan Jamaah Haji Embarkasi Indramayu Kertajati (KJT)

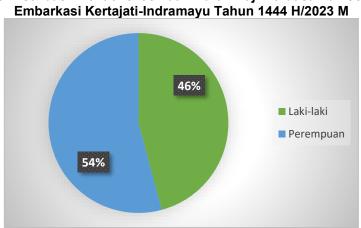
Kegiatan Penyelenggaraan Kesehatan Haji Embarkasi Kertajati-Indramayu Tahun 1444 H/2023 M periode pemberangkatan (embarkasi) dimulai pada tanggal 27

Mei 2023 sampai dengan 23 Juni 2023. Kegiatan yang dilakukan meliputi pemeriksaan ketiga kesehatan Jemaah Calon Haji calon haji termasuk pemeriksaan Jemaah Calon Haji risiko tinggi khusus, pengendalian karantina dan surveilans epidemiologi, pelayanan kesehatan di klinik asrama haji termasuk pemeriksaan laboratorium penunjang.

Setelah Jemaah Calon Haji diterima oleh petugas PPIH Embarkasi Kertajati-Indramayu dilanjutkan dengan pemeriksaan dokumen kesehatan Jemaah Calon Haji. Hasil pemeriksaan kesehatan Jemaah Calon Haji haji tahap pertama dan kedua terekam dalam KKJH yang sudah di entri kedalam siskohatkes baik di tingkat Puskesmas dan Dinas Kesehatan Kab./Kota, sedangkan pemeriksan ketiga/akhir dilakukan di asrama haji bekasi dengan melakukan validasi dokumen kesehatan yang dibawa jemaah calon haji. Adapun dokumen kesehatan tersebut adalah:

- 1) Berita acara Istitoah yang sudah di tanda tangani petugas kesehatan Kab/ Kota
- 2) KKJH (Kartu Kesehatan Jemaah calon haji)
- 3) Surat Keterangan telah dilakukan vaksinasi meningitis dan Covid 19 (dosis 1 &2)
- 4) Hasil pemeriksaan kehamilan terhitung 7 hari sebelum keberangkatan

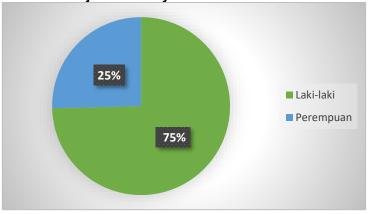
Validasi dokumen kesehatan yaitu kegiatan verifikasi /validasi hasil pemeriksaan kesehatan yang telah dilakukan di daerah masing-masing (kabupaten/kota), berlangsung rata-rata antara 45-60 menit. Pemeriksaan tahap ketiga ini dilaksanakan selama 28 hari dengan jumlah Jemaah Calon Haji haji dan petugas yang diperiksa secara keseluruhan sebanyak 9.272 orang yang terdiri dari Jemaah Calon Haji sebanyak 9.075 orang yaitu laki-laki 4162 orang dan perempuan 4913 orang, serta petugas sebanyak 197 orang yaitu laki-laki 148 orang dan perempuan 49 orang, seperti terlihat pada grafik berikut:



Grafik 2. 19 Distribusi Frekuensi Jemaah Calon Haji Berdasarkan Jenis Kelamin Embarkasi Kertajati-Indramayu Tahun 1444 H/2023 M

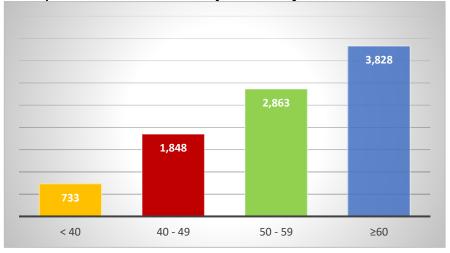
Dari grafik di atas dapat dilihat, Jemaah Calon Haji Jawa Barat di Embarkasi Kertajati didominasi oleh Jemaah Calon Haji perempuan yaitu sebanyak 54% (4913 orang) sedangkan Jemaah Calon Haji laki-laki hanya 46% (4162 orang).

Grafik 2. 20Distribusi Frekuensi Petugas Haji Berdasarkan Jenis Kelamim Embarkasi Kertajati-Indramayu Tahun 1444 H/2023 M



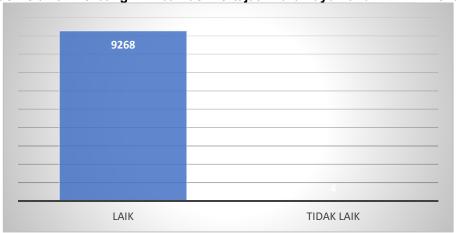
Dari grafik di atas dapat dilihat, Petugas haji Jawa Barat di Embarkasi Kertajati didominasi oleh Petugas Haji laki-laki yaitu sebanyak 75 % (148 orang) sedangkan petugas haji perempuan hanya 25 % (49 orang).

Grafik 2. 21Distribusi Frekuensi Jemaah Calon Haji dan Petugas Haji Berdasarkan Kelompok Umur Embarkasi Kertajati-Indramayu Tahun 1444 H/2023 M



Dari grafik di atas, dapat terlihat Jemaah Calon Haji dan Petugas haji Jawa Barat di Embarkasi Kertajati didominasi oleh kelompok umur ≥ 60 tahun yaitu sebanyak 3828 (41.3 %) dan yang paling sedikit yaitu kelompok umur < 40 tahun yaitu sebanyak 733 (7.9 %). Sehingga tema haji tahun 1444 H/2023M yaitu "Haji Ramah Lansia" karena didominasi oleh lansia. Oleh karena itu dibutuhkan fasilitas pelayanan kesehatan yang lebih memadai bagi kelompok usia lanjut diantaranya kursi roda

dengan jumlah yang memadai, obat - obatan yang sering dikonsumsi seperti obat DM, obat jantung, obat hipertensi, obat kolesterol, juga perlengkapan penunjang lansia (seperti kantong pipis dan popok) serta dibutuhkan tenaga pendamping jamaah usia lanjut (seksi uzur) yang lebih banyak.



Grafik 2. 22 Distribusi Frekuensi Jemaah Calon Haji dan Petugas Haji Berdasarkan Status Kelaikan Terbang Embarkasi Kertajati-Indramayu Tahun 1444 H/2023 M

Dari tabel di atas dapat dilihat, jumlah Jemaah Calon Haji dan Petugas haji Jawa Barat di Embarkasi KJT yang dinyatakan laik terbang berjumlah 9268 (99.96 %) orang dan yang tidak laik terbang sebanyak 4 orang (0.04 %).

4. Penyelidikan Epidemiologi dalam Situasi KLB/Wabah

Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Bandung dalam menjalani tugas dan fungsinya sesuai dengan dengan Peraturan Menkes RI No 33 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja KKP yang diperkuat dengan adanya UU Karantina Kesehatan No 6 Tahun 2018 menyatakan bahwa Kekarantinaan Kesehatan di Pintu Masuk dan di wilayah dilakukan melalui kegiatan pengamatan penyakit dan Faktor Risiko Kesehatan Masyarakat terhadap alat angkut, orang dan barang yang merupakan respons terhadap Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dalam bentuk tindakan Kekarantinaan Kesehatan. Hal ini pun sesuai dengan Pemberlakuan International Health Regulation (IHR) Tahun 2005.

Pelaksanaan kegiatan yang dimaksud juga meliputi kegiatan penyelidikan epidemiologi terhadap kasus penyakit yang meresahkan masyarakat dan berada di wilayah berdasarkan pembinaan Dinas Kesehatan setempat. Dalam hal penyakit difteri, maka keterlibatan KKP sebagai UPT Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementrian Kesehatan RI juga turut membantu melakukan kegiatan penyelidikan epidemiologi terhadap kasus tersebut.

Pada tahun 2023 beberapa kasus penyakit menular mulai merebak di wilayah, dimana kondisi ini termasuk tindakan pengawasan dari KKP Kelas II Bandung bekerjasama dengan pihak Dinas Kesehatan setempat guna mengantisipasi keluar masuknya penyakit menular di pintu masuk negara. Perolehan informasi mengenai kasus penyakit menular yang merebak di wilayah Jawa Barat juga diharapkan dapat membantu pelaksanaan kegiatan deteksi dan respon di pintu masuk negara yang merupakan kapasitas inti Pelabuhan laut maupun udara.

Adapun dasar hukum dalam pelaksanaan kegiatan Penyelidikan Epidemiologi adalah sebagai berikut :

- a. Undang Undang No. 6 Tahun 2018 Tentang Karantina Kesehatan
- b. Permenkes no. 33 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan
- c. Kepmenkes 949 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Kewaspadaan Dini Kejadian Luar Biasa
- d. Kepmenkes 1116 Tahun 2003 tentang Pedoman penyelenggaraan Sistem Survailans Epidemiologi Kesehatan
- e. Kepmenkes 1479 Tahun 2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Survailans Epidemiologi Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular Terpadu.

Adapun beberapa kegiatan Penyelidikan Epidemiologi dalam situasi KLB/Wabah adalah sebagai berikut :

Tabel 2. 2 Hasil Kegiatan Penyelidikan Epidemiologi dalam Situasi KLB/Wabah

No	Nama Kegiatan	Tanggal	Lokasi	Langkah-Langkah Yang Dilakukan
1	Leptospirosis	06 dan 07 Februari 2023	Palabuhan Ratu	Wawancara dan skrining kesehatan serta pengolahan data dari 48 pop at risk ada 13 orang yang dilanjut RDT .dan dari 13 sampel ada 1 hasil RDT nya mengarah ke positif
2	Gagal Ginjal Akut Progresif Atipikal	17 dan 18 Februari 2023	Kab Cirebon	 Koordinasi dengan lintas terkait Dinkes Kab Cirebon dan Puskesmas/RS setempat Wawancara untuk menggali informasi dengan keluarga pasien
3	Difteri	01 dan 02 Maret 2023	Kab Garut	 Koordinasi dengan lintas terkait Dinkes Kab Garut Wawancara dengan petugas kesehatan baik dari Fasyankes/ Dinas Kesehatan Garut disertai pihak Kemenkes RI dan WHO terhadap orang tua dari penderita. Pengumpulan data sekunder yakni berasal dari laporan surveilans dan PE yang ada di wilayah kabupaten Garut.

4	Polio	17 dan 18 April 2023	Kab Purwakarta	 Koordinasi dengan lintas terkait Dinkes Kab Purwakarta Wawancara dengan petugas kesehatan baik dari Fasyankes/ Dinkes Purwakarta disertai pihak Kemenkes RI dan WHO terhadap orang tua dari penderita. Memperoleh laporan surveilans dan PE yang ada di wilayah kabupaten Purwakarta.
5	Virus Nipah	26 September 2023	Seluruh Kab/Kota di Jawa Barat	Koordinasi dengan instansi terkait dan stake holder di pintu masuk negara Menerbitkan SE kewaspadaan nipah virus di pintu masuk kepada instansi terkait dan stake holder
6	Malaria dan Mpox	20 dan 21 November 2023	Kota Cirebon	1.Koordinasi dengan lintas terkait Dinkes Kota Cirebon 2. Wawancara dengan format instrument pengumpulan data sbg informasi pelengkap hasil verifikasi rumor dan PE pada situasi KLB/wabah 3. Pengumpulan data sekunder yakni berasal dari laporan surveilans dan PE tentang Malaria dan Mpox di wilayah Dinkes Kota Cirebon
7	Мрох	22 dan 23 November 2023	Kabupaten Cirebon	Koordinasi dengan Dinkes kab Cirebon, Puskesmas Pamengkang Wawancara dengan format instrument pengumpulan data sbg informasi pelengkap hasil verifikasi rumor dan PE pada situasi KLB/wabah Pengumpulan data sekunder yakni berasal dari laporan surveilansdan PE tentang Mpox di wilayah Kab Cirebon
8	Мрох	27 dan 28 November 2023	Kota Depok	Koordinasi dengan Dinkes kota Depok Wawancara dengan format instrument pengumpulan data sbg informasi pelengkap hasil verifikasi rumor dan PE pada situasi KLB/wabah Pengumpulan data sekunder yakni berasal dari laporan surveilansdan PE tentang Mpox di wilayah Kota Dep ok

5. Surveilans Faktor Risiko Penyakit pada Kegiatan Piala Dunia U17 di Jawa Barat

Turnamen Piala Dunia U-17 diselenggarakan pada tanggal 10 November 2023 sampai dengan 2 Desember 2023. Ini adalah pertama kalinya Indonesia menggelar sebuah

turnamen FIFA. Ini juga merupakan pertama kalinya Piala Dunia U-17 digelar di Asia Tenggara.

Total sebanyak 24 negara yang lolos Piala Dunia U-17. Ke-24 negara peserta tersebut lantas dibagi ke dalam enam grup Piala Dunia U-17, yaitu Grup A sampai Grup F.

Indonesia sebagai tuan rumah dalam penyelenggaraan Piala Dunia U17 yang akan berlangsung tanggal 10 November s/d 02 Desember 2023 di stadion yang memenuhi syarat yaitu Jakarta Internasional stadium/JIS (Jakarta), stadion Gelora Bung tomo (Surabaya), Stadion Si Jalak Harupat (Bandung, dan stadion Manahan (Solo) yang diikuti oleh 24 negara yang berasal dari 6 konfender. Di Jawa Barat Pertama kali dalam sejarah Kabupaten Bandung menjadi tuan rumah pertandingan Piala Dunia U-17 tahun 2023. Pertandingan yang bergensi ini akan dilaksanakan di Stadion Si Jalak Harupat Kabupaten Bandung mulai tanggal 11 – 21 November 2023.

Berdasarkan Instruksi Presiden bahwa hampir semua kementerian ikut terlibat dalam event ini, begitu pula Kementerian Kesehatan ikut dalam mendukung dan memfasilitasi dengan pengawasan teknis medis penyelengaraan pelayanan kesehatan yaitu penyediaan pelayanan medis, pelayanana medis di venue dan penyediaan fasilitas rumah sakit. Subdit Surveilans Kementerian Kesehatan RI, mengadakan rapat persiapan via zoom dengan mengahadirkan nara sumber dari PHEOC yang dihadiri oleh beberapa KKP dan Dinaas Kesehatan Provinsi pada tanggal 6 November 2023.

Dalam rangka kewaspadaan dini terhadap penyakit potensial wabah, maka diperlukan pengawasan terhadap faktor risiko penyakit yang mungkin terjadi selama kegiatan piala dunia U-17 berlangsung. Tempat – tempat yang di awasi dan di pantau adalah tempat yang dijadikan venue pertandingan, tempat latihan maupun tempat penginapan atlit dan official kegiatan tersebut ada di wilayah Kabupaten dan Kota Bandung. Adapun fokus pemantauan sudah ditentukan terhadap 6 penyakit yaitu ISPA, Diare Akut, Covid-19, Keracunan Pangan, Malaria, Susp. Dengue.

Setelah rapat persiapan tingkat pusat via zoom, KKP dan Dinas kesehatan provinsi Jawa Barat selaku leading sektor bidang kesehatan piala dunia U-17 merasa perlu membangun kesepakatan, sehingga melakukan pertemuan dengan tujuan membahas terkait pengumpulan data dan sistem pelaporan. Selanjutnya KKP dalam hal ini subtansi Pengendalian Karantina dan Surveilans Epidemiologi menindaklanjuti hasil rapat tersebut yaitu membentuk tim surveilans yang terdiri dari 3 orang, bertugas setiap harinya secara bergantian dan bertanggungjawab terhadap pemantauan faktor risiko kesehatan dan pelaporan harian serta penginputan data (cut off pukul 12.00) ke dalam aplikasi PHOEC (phoec.surveilans.org) mulai tanggal 8 November 2023.

Adapun hasil dari pemantauan penyakit selama pelaksanaan piala dunia u-17 di Stadion Si Jalak Harupat yaitu:

- a. Sebanyak 144 orang berobat ke pos kesehatan di Stadion Si Jalak Harupat yang terdiri dari 115 laki-laki dan 29 perempuan. Sebanyak 20 orang masyarakat/ pengunjung, 7 orang dari media peliputan, 54 orang official, dan 63 orang lainnya.
- b. Sebanyak 16 orang dengan diagnosa Ispa dan 5 orang dengan diagnosa diare.
- c. Sebagian besar yang berobat bukan merupakan 6 fokus penyakit yang ditentukan.
- d. Berdasarkan umur, <18 tahun sebanyak 4 orang, umur 18 49 tahun sebanyak 136 orang, dan umur ≥50 tahun sebanyak 4 orang.
- e. Selama pelaksanaan event Piala Dunia U-17 di Stadion Si Jalak Harupat, tidak terjadi kasus KLB/ Wabah suatu penyakit.



Gambar 2. 3 Dokumentasi Kegiatan Surveilans Faktor Risiko Penyakit pada Kegiatan Piala Dunia U-17 di Stadion Si Jalak Harupat Kab. Bandung

B. Kegiatan Upaya Kesehatan dan Lintas Wilayah

Pelaksanaan kegiatan Kantor Kesehatan Pelabuhan berdasarkan Permenkes Nomor 33 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan, substansi Upaya Kesehatan dan Lintas Wilayah merupakan bagian dari Kantor Kesehatan Pelabuhan yang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan, dan koordinasi pelayanan kesehatan terbatas, kesehatan kerja, kesehatan matra, kesehatan haji, perpindahan penduduk, penanggulangan bencana, vaksinasi

internasional, pengembangan jejaring kerja, kemitraan, kajian dan teknologi, serta pelatihan teknis bidang upaya kesehatan di wilayah kerja bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat negara.

Pada tahun 2023 Substansi Upaya Kesehatan dan Lintas Wilayah, telah melakukan kegiatan-kegiatan sesuai dengan Permenkes tersebut antara lain sebagai berikut :

1. Peringatan Hari HKN ke 59 tahun 2023

Hari Kesehatan Nasional (HKN) setiap tahunnya diperingati pada tanggal 12 November. Peringatan yang dilaksanakan bertujuan untuk membangun kesadaran masyarakat Indonesia tentang pentingnya kesehatan. Hari Kesehatan Nasional (HKN) yang ke 59 tahun 2023 memiliki tema "Transformasi Kesehatan Untuk Indonesia Maju" yang memfokuskan pelayanan kesehatan ke arah promotif (edukatif) dan preventif (pencegahan), salah satu upaya yang ditekankan oleh Kementerian Kesehatan yaitu dengan rutin melakukan pemeriksaan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes).

Dalam rangka memperingati Hari Kesehatan Nasional, Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Bandung pada tanggal 1 s.d 3 November tahun 2023 turut berpartisipasi dengan mengadakan kegiatan pemeriksaan kesehatan gratis, pengobatan gratis dan donor darah bertempat di Wilayah Kerja Palabuhan Ratu. Pemeriksaan kesehatan yang dilakukan berupa pemeriksaan gula darah, asam urat,kolesterol, TB dan HIV. Kegiatan ini bekerjasama dengan Dinas Kesehatan setempat, puskesmas, dokes polri, Poltekkes Kemenkes Bandung dan kegiatan donor darah bekerjasama dengan UPT Transfusi Darah Dinas Kesehatan Kabupaten Sukabumi. Adapun sasaran kegiatan ini yaitu: masyarakat sekitar pelabuhan, pegawai di area pelabuhan serta masyarakat umum.

Selama 3 hari kegiatan, tercatat 250 orang yang dilakukan pemeriksaan kesehatan dan sebanyak 100 orang yang melakukan donor darah. Hasil pemeriksaan kesehatan sebagai berikut :

1) Pemeriksaan PTM

Terdapat 18 orang memiliki resiko mengalami penyakit tidak menular.

2) Pemeriksaan PML

Tedapat 5 orang memiliki risiko penyakit TB dengan gejala batuk lebih dari 2 minggu disertai tidak nafsu makan dan 1 orang memiliki risiko penyakit HIV AIDS dengan hasil pemeriksaan rapid test HIV reaktif.

Adapun tindak lanjut dari hasil pemeriksaan yang memiliki risiko PTM dan PML dilakukan edukasi dan dilakukan rujukan ke puskesmas/RS untuk tindakan serta pemeriksaan pemeriksaan kesehatan lebih lanjut.



Gambar 2. 4 Peringatan Hari HKN di Wilker Palabuhan Ratu

2. Pelayanan Kesehatan Terbatas Bandara Kertajati Majalengka

Bandar Udara Internasional Kertajati (IATA: KJT, ICAO: WICA), juga dikenal Bandar Udara Internasional Jawa Barat (BIJB) adalah bandar udara yang berada di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, Indonesia.

Bandar udara ini diresmikan operasinya pada tanggal 24 Mei 2018, dengan Pesawat Kepresidenan Indonesia mendarat sebagai yang pertama di bandar udara ini.

Pembangunan Bandar Udara Internasional Kertajati direncanakan sejak era Presiden Megawati Soekarnoputri. Studi kelayakan bandara ini ada sejak tahun 2003 dan izin penetapan lokasi dilakukan tahun 2005.

Sejak 17 Mei 2023, Bandar Udara Internasional Kertajati melayani penerbangan niaga berjadwal internasional rute Kertajati (KJT) – Kuala Lumpur (KUL) dan sebaliknya. Pada 29 Oktober 2023 bandara ini beroperasi penuh melayani penerbangan domestik ke beberapa destinasi dalam negeri, seperti Kualanamu, Denpasar, Palembang, Batam, Balikpapan, Banjarmasin, dan Makassar.

Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Bandung mempunyai tugas melaksanakan pencegahan masuk dan keluarnya penyakit, penyakit potensial wabah, surveilans epidemiologi, kekarantinaan, pengendalian dampak kesehatan lingkungan, pelayanan kesehatan, pengawasan OMKABA serta pengamanan terhadap penyakit baru dan penyakit yang muncul kembali, bioterorisme, unsur biologi, kimia dan pengamanan radiasi di wilayah kerja bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat negara. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Bandung menyelenggarakan 16 (enam belas) fungsi salah satunya yaitu pelaksanaan pemberian pelayanan kesehatan di wilayah kerja bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat negara. Selama tahun 2023 pelayanan kesehatan yang dilakukan di Bandar Udara Internasional Kertajati, sebagai berikut :



Grafik 2. 23 Pelayanan Kesehatan Terbatas di Bandar Udara Internasional Kertajati Tahun 2023

Berdasarkan data di atas jumlah pelayanan yang terbanyak yaitu pelayanan Surat Keterangan Layak Terbang. Bulan Oktober 9 orang, November 71 orang dan Desember sebanyak 69 orang.









Gambar 2. 5Pelayanan Kesehatan di Pos Kesehatan Bandar Bandar Udara Internasional Kertajati Tahun 2023

3. Pelayanan Vaksinasi bagi Pelaku Perjalanan Internasional dan Vaksinasi Covid19

Vaksinasi adalah pemberian Vaksin yang khusus diberikan dalam rangka menimbulkan atau meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit, sehingga apabila suatu saat terpajan dengan penyakit tersebut tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan dan tidak menjadi sumber penularan.

Sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Dan Penerbitan Sertifikat Vaksinasi Internasional Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas memeiliki kewenangan untuk memberikan pelayanan vaksinasi

pada pelaku perjalanan internasional, yaitu Vaksin Meningit dan Vaksin Yellow Fever. Tujuan pemberian vaksinasi internasional ini untuk menghindari terjadinya tansmisi penyakit dari pelaku perjalanan.

Selain pemberian vaksin pada Pelaku Perjalanan Internasional KKP Kelas II Bandung juga memberikan pelayanan vaksin covid19 pada masyarakat sebagai salah satu upaya tercapainya *Herd Immunity*.



Gambar 2. 6 Infografis Pelayanan Vaksinasi Tahun 2023

Pada grafik diatas dapat diketahui bahwa pada tahun 2023 KKP Kelas II Bandung telah melakukan pelayanan vaksinasi sebanyak, yang terbanyak vaksinasi Covid19 8226 orang, vaksinasi Meningitis sebanyak 5577 orang dan vaksinasi Yellow Fever 550 orang.

C. Kegiatan Pengendalian Risiko Lingkungan (PRL)

Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan, sebagai salah satu KKP Kelas II di Indonesia, KKP Kelas II Bandung menyelenggarakan fungsi pelaksanaan Pengendalian Risiko Lingkungan di bandara, pelabuhan dan lintas batas darat negara serta pelaksanaan pengamatan penyakit potensial wabah, penyakit baru dan penyakit yang muncul kembali. Fungsi ini sangat erat kaitannya dengan masalah kesehatan lingkungan dan pengendalian vektor. Program KKP Kelas II Bandung dalam hal Pengendalian Risiko

Lingkungan yang telah dilaksanakan pada tahun anggaran 2023 secara keseluruhan dapat dilihat pada laporan kegiatan sebagai berikut:

1. Pengendalian Tikus dan Pinjal

Kegiatan pengendalian tikus dan pinjal di KKP Kelas II Bandung merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan sebanyak 9 (sembilan) kali dalam satu tahun anggaran. Tujuan dari pengendalian tikus dan pinjal ini adalah untuk mencegah maupun mengendalikan potensi penyebaran penyakit yang disebabkan oleh tikus maupun pinjalnya. Dalam hal ini faktor risiko penyakit yang dapat ditularkan dari adanya keberadaan tikus dan pinjal yaitu penyakit pes yang disebabkan oleh pinjal tikus dan penyakit leptospirosis yang disebabkan oleh urin tikus.

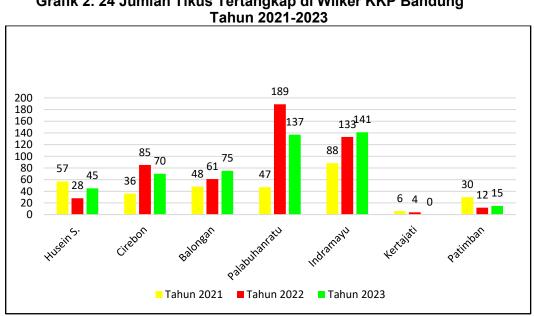
Kegiatan pengendalian tikus dan pinjal di KKP Kelas II Bandung diawali dengan melakukan pengamatan atau survey awal kehidupan tikus dan pinjal dengan melakukan pemasangan perangkap (trapping) pada bangunan perkantoran, gudang dan Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) baik berupa warung makan, restoran maupun Sentra Pedagang Makanan Jajanan. Terhadap Tikus yang tertangkap dilakukan identifikasi berdasarkan ciri kualitatif maupun kuantitatif untuk mengetahui spesies tikus sekaligus melakukan penyisiran pada rambut tikus untuk mengamati apakah terdapat pinjal atau tidak. Dalam satu kali kegiatan, proses ini dilaksanakan selama 4 hari berturut-turut. Apabila hasil Index Pinjal > 1 atau kategori major, maka tindakan pengendalian yang dilakukan yaitu poissoning (peracunan) yaitu pemasangan perangkap dengan umpan yang dibubuhi racun tikus atau dusting (pendebuan) dengan bahan insektisida yaitu menaburkan debu insektisida pada sepanjang jalur (runway) tikus.





Gambar 2. 7 Pelaksanaan Pengendalian Tikus dan Pinjal

Hasil kegiatan pengendalian tikus dan pinjal di KKP Kelas II Bandung (yang meliputi 6 wilayah kerja (wilker) dan pos, yaitu Pos Bandara Husein Sastranegara Bandung, Wilker Pelabuhan Laut Cirebon, Wilker Pelabuhan Laut Indramayu, Wilker Pelabuhan Laut Palabuhanratu Sukabumi, Pos Pelabuhan Patimban serta Pos Bandara Internasional Kertajati Majalengka) selama 3 (tiga) tahun terakhir dapat terlihat pada grafik:



Grafik 2. 24 Jumlah Tikus Tertangkap di Wilker KKP Bandung

Dari hasil rekapitulasi tikus yang tertangkap di area bandara maupun pelabuhan, jumlah tangkapan tikus tertinggi berada di pelabuhan indramayu dan pelabuhan palabuhan ratu sukabumi dibanding dengan wilayah kerja lainnya. Hal ini bisa terjadi sehubungan dengan kondisi wilayah kerja palabuhanratu sukabumi dan pelabuhan karangsong indramayu merupakan pelabuhan ikan dimana terdapat aktivitas jual beli hasil tangkapan nelayan. Pelabuhan ikan ini identik dengan pelabuhan tradisional dimana sarana sanitasi belum terkelola dengan baik. Pasar tradisional identik dengan fasilitas sanitasi yang tidak mendukung seperti aliran drainase yang tidak mengalir, sampah yang tidak terkelola dengan baik sehingga menjadi kesukaan untuk tikus berkembang biak di area pasar ikan karena makanan yang melimpah dari bangkai ikan dan jenis sea food lainnya. Sedangkan untuk tangkapan paling sedikit yaitu Pelabuhan patimban dan Bandara Kertajati. Hal ini terjadi mengingat pelabuhan patimban merupakan pelabuhan baru yang aktivitas utamanya adalah untuk kegiatan ekspor impor kendaraan. Sarana sanitasi di pelabuhan patimban ini terbilang baik sehingga tidak banyak mengundang kehadiran tikus meskipun masih ada didapatkan dalam jumlah sedikit. Begitu pula dengan kondisi di Bandara BIJB Kertajati dimana hampir selama operasional terutama di tahun 2023 masih sedikit penerbangan, dan letaknya yang jauh dari pemukiman dan banyaknya TPP (Tempat Pengelolaan Pangan) yang tutup sehingga tidak menarik kehadiran tikus untuk berkembang biak di area bandara.

Kepadatan tikus yang tinggi di area bandara dan pelabuhan dapat menimbulkan faktor risiko penyakit leptospirosis yang bersumber dari urin tikus. Angka kepadatan yang tinggi di wilayah kerja palabuhan ratu sukabumi dan wilker indramayu harus diperhatikan. Untuk memastikan tidak ada penularan leptospirosis di dua wilayah tersebut, perlu melakukan deteksi dini dengan melakukan surveilans sentinel tikus untuk mengetahui faktor risiko penyakit leptospirosis di wilayah tersebut.

Setiap tikus yang tertangkap dan diidentifikasi spesies nya, akan dilakukan proses penyisiran untuk diambil pinjal yang terdapat dalam tubuh tikus. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa dalam tubuh tikus, pinjal yang didapatkan tidak melebihi ambang batas yang disyaratkan yaitu indeks pinjal >1 (mayor). Perhitungan indeks pinjal ini yaitu dengan membagi jumlah pinjal yang tertangkap dibagi jumlah tikus tertangkap. Berikut data indeks pinjal di wilayah kerja KKP Bandung selama 3 (tiga) tahun terakhir (2021 s.d. 2023) terlihat pada grafik berikut:



Grafik 2. 25 Index Pinjal di Wlilayah Kerja KKP Bandung Periode 2021 s.d. 2023

Dari gambaran grafik di atas, hasil pengukuran indeks pinjal seluruh wilayah kerja KKP Kelas II Bandung dari periode 2021 sampai dengan 2023 masih dalam kategori minor (risiko rendah) untuk faktor risiko penyakit yang ditularkan melalui gigitan pinjal tikus. Adapun rata-rata tertinggi indeks pinjal mendekati angka 1 pernah terjadi di wilayah kerja Palabuhanratu dengan angka indeks 0,64.

2. Pengendalian Vektor Nyamuk Aedes aegypti

Dalam rangka pengendalian vektor dan binatang pembawa penyakit di Pelabuhan/ Bandara, salah satunya adalah dengan pengendalian jentik/ larva dan nyamuk *Aedes aegypti* yang merupakan vektor utama untuk penyakit DBD dan yellow fever.

Amanat International Health Regulation mengharuskan daerah perimeter baik pelabuhan maupun bandara bebas dari kehidupan nyamuk Aedes aegypti baik stadium larva maupun stadium dewasa, maka perlu dilakukan pengamatan terhadap kontainer-kontainer yang menjadi tempat perindukan larva Aedes aegypti baik di dalam maupun di luar bangunan. Kegiatan survei larva Aedes ini rutin dilaksanakan setiap satu bulan sekali sehingga total dilakukan 12 kali survei rutin selama satu tahun.



Gambar 2. 8 Kegiatan survey vektor jentik Aedes

Berikut adalah hasil kegiatan survei vektor larva *Aedes* dengan pemeriksaan atau pemantauan jentik pada bangunan dan kontainer di wilayah perimeter bandara dan pelabuhan di wilayah kerja KKP Kelas II Bandung selama periode tahun 2020-2023 terlihat pada grafik di bawah ini:



Grafik 2. 26 House Index Memenuhi Syarat Wilayah Perimeter di Wilayah Kerja KKP Kelas II Bandung Tahun 2019-2022

Berdasarkan grafik di atas, wilayah kerja yang 100% selalu memenuhi syarat tidak ditemukan larva Aedes aegypti di wilayah perimeter ada di pelabuhan khusus Balongan. Hal ini bisa disebabkan dikarenakan lingkungan perimeter pelabuhan khusus Balongan merupakan bagian dari wilayah terbatas milik Pertamina Balongan, dimana sistem sanitasi di dalam ruangan dijaga secara ketat dari semua faktor risiko yang memungkinkan

menyebabkan gangguan kesehatan atau penyakit. Sedangkan wilayah kerja yang hampir setiap bulannya Tidak Memenuhi Syarat yaitu di Palabuhanratu Sukabumi. Penyebab dari sering tidak memenuhi syarat di lokasi ini dikarenakan banyaknya kontainer tidak menetap yang selalu berubah ubah di setiap pemeriksaan. Kontainer yang dimaksud biasanya seperti perahu yang lama tidak digunakan, drum air bersih yang berganti-ganti, serta ban bekas.

Meskipun hasil awal tidak memenuhi syarat, Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Bandung selalu sigap dengan langsung melakukan pengendalian terhadap faktor risiko keberadaan Larva *Aedes aegypti*. Hal yang dilakukan adalah dengan membuang air dalam kontainer jika kontainernya dalam skala kecil, ataupun dengan pembubuhan larvasida sesuai volume kontainer.

3. Pengendalian Vektor Nyamuk Anopheles spp.

Wilayah perimeter pelabuhan/ bandara harus terbebas dari kehidupan nyamuk Anopheles sp. yang merupakan vektor penular penyakit Malaria. Upaya pengendalian nyamuk Anopheles sp. dimulai dari tahap survey awal Anopheles sp. baik stadium larva maupun stadium dewasa. Survey larva Anopheles sp. dilaksanakan setiap 1 bulan sekali dan untuk survey nyamuk dewasa dilaksanakan setiap 3 bulan. Langkah pengendalian dilakukan apabila hasil perhitungan Man Hour Density (MHD), Man Bitting Rate (MBR) ataupun Dipper Index (DI) nya melebihi ambang batas (MHD/MBR/DI > 0). Kegiatan pengendalian vektor nyamuk Anopheles spp. dilakukan di 5 wilayah kerja KKP Kelas II Bandung yaitu Pelabuhan Cirebon, Pelabuhan Khusus Balongan, Pelabuhan Indramayu, Palabuhan Ratu Sukabumi dan yang terbaru yaitu Pelabuhan Patimban Subang. Sedangkan di Bandara Husein Sastranegara Bandung dan Bandara Internasional Jawa Barat Kertajati tidak dilakukan karena tidak ditemukan adanya faktor risiko tempat perindukan nyamuk Anopheles sp.

Keberadaan nyamuk Anopheles yang berada di wilayah perimeter ditemukan di wilayah kerja Pelabuhan Patimban Subang, sedangkan untuk area buffer ditemukan di wilayah kerja Palabuhanratu sukabumi.

4. Pengendalian Vektor Lalat

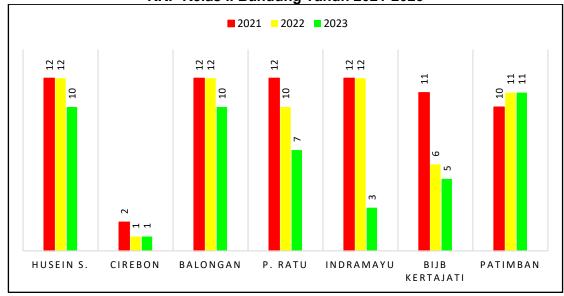
Wilayah perimeter pelabuhan dan bandara harus terbebas dari vektor penyakit diare yaitu salah satunya serangga lalat. Vektor lalat merupakan jenis vektor mekanik yang membawa bahan pencemar atau agent penyakit lewat bagian kaki yang hinggap pada makanan. Upaya pengendalian lalat dimulai dari tahap survei pengukuran kepadatan lalat kemudian diikuti dengan upaya pengendalian apabila kepadatan lalat masuk dalam kategori risiko tinggi.



Gambar 2. 9 Pemeriksaan Kepadatan Lalat

Kegiatan pengendalian lalat dilakukan setiap 1 bulan sekali di seluruh wilayah kerja KKP Bandung dengan hasil sebagai berikut:

> Grafik 2. 27 Kepadatan Lalat Memenuhi Syarat di Wilayah Kerja KKP Kelas II Bandung Tahun 2021-2023



Dari grafik diatas diketahui bahwa masih ada wilayah kerja yang indeks kepadatan/ populasi lalatnya tidak sesuai dengan standar baku mutu. Dinyatakan tidak memenuhi syarat apabila hasil indeks populasi lalatnya ≥ 2 berdasarkan Permenkes No.2 Tahun 2023. Dari grafik di atas terlihat bahwa indeks populasi lalat paling tinggi yaitu di wilker Pelabuhan Laut Cirebon setiap tahunnya. Hal ini disebabkan pengelolaan sampah yang belum baik di pelabuhan cirebon sehingga menyumbang angka kepadatan lalat yang tinggi.

Sebagai tindak lanjut dari hasil survey yang tidak memenuhi syarat dilakukan kegiatan pengendalian berupa *Spraying* pada Tempat Penampungan Sampah Sementara (TPS) di area pelabuhan.

5. Pengendalian Vektor Kecoa

Selain serangga lalat yang menjadi vektor penyebab penyakit Diare, terdapat serangga lain yang harus dikendalikan keberadaannya yaitu serangga kecoak. Upaya pengendalian kecoa dimulai dari tahap survei pengukuran kepadatan kecoa dengan cara memasang lem umpan yang akan diobservasi selama 24 jam. Apabila hasil survei dalam kategori tinggi (indeks kecoa > 2) sesuai Permenkes No.2 Tahun 2023, dilakukan tindakan pengendalian berupa *spraying* atau pemberian racun berupa gel di area tempat perindukan kecoa.



Gambar 2. 10 Kegiatan Survey dan Pengendalian Kecoa

Adapun hasil survey kepadatan kecoa yang memenuhi syarat pada periode tahun 2021-2023 dapat dilihat pada grafik di bawah ini:



Grafik 2. 28 Indeks Kepadatan Kecoa Memenuhi Syarat di Wilayah Kerja KKP Kelas II Bandung Tahun 2021-2023

Dari grafik di atas diketahui bahwa kepadatan kecoak di setiap wilayah kerja fluktuatif di setiap tahunnya. Pada tahun 2022 sudah terdapat wilayah kerja yang tingkat kepadatan kecoak nya 100% memenuhi syarat yaitu Pelabuhan Balongan, Pelabuhan Indramayu, Palabuhanratu Sukabumi dan Pelabuhan Patimban. Sedangkan di tahun 2023 hanya Wilker Palabuhanratu Sukabumi saja yang kepadatan kecoa nya 100% memenuhi syarat. Khusus untuk Bandara Husein Bandung dan Bandara Kertajati belum memenuhi syarat karena biasanya TPP di Bandara mudah berkembang vektor kecoa jenis spesies Blatella germanica yang bersumber dari banyak faktor, baik dari bawaan penumpang, makanan di pesawat yang akhirnya bersarang di TPP dan berkembang biak disana. Permasalahan utama di bandara pada tahun 2023 adalah operasional penerbangan bandara yang belum maksimal baik di bandara Husein Sastranegara Bandung maupun bandara BIJB Kertajati sehingga pihak TPP mengalami defisit pemasukan, sehingga kegiatan pest control yang biasanya rutin dilaksanakan menjadi tidak dilaksanakan.

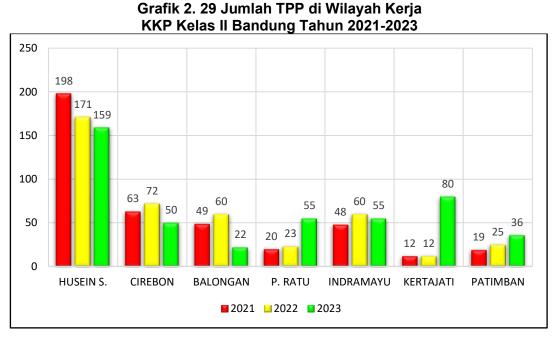
6. Tempat Pengelolaan Pangan (TPP)

Kegiatan pengawasan TPP rutin dilakukan setiap bulan di enam wilayah kerja KKP Kelas II Bandung yaitu Bandara Husein Sastranegara Bandung, Pelabuhan Indramayu (termasuk Balongan), Pelabuhan Cirebon, Pelabuhan Patimban, Palabuhanratu Sukabumi serta Bandara BIJB Kertajati Majalengka.



Gambar 2. 11 Kegiatan Inspeksi Hygiene Sanitasi TPP

Adapun jumlah TPP yang dilakukan inspeksi hygiene sanitasinya di wilayah kerja KKP Kelas II Bandung selama periode tahun 2021 s.d. 2023 sebagai berikut:



Jumlah pemeriksaan TPP dalam rangka pengawasan di lingkungan KKP Kelas II Bandung mengalami kondisi yang berbeda-beda di setiap wilayah kerja, ada yang semakin menurun dan ada yang meningkat. Kondisi ini terjadi karena banyak faktor, seperti di Bandara Husein Sastranegara, dikarenakan semakin menurunnya jumlah penerbangan maka semakin sedikit TPP yang diperiksa karena sedikit demi sedikit TPP yang berjualan mulai gulung tikar atau tutup saat tidak ada operasional. Berbanding terbalik dengan

Bandara Kertajati yang semakin meningkat jumlah penerbangannya sehingga membuat banyak investor membuka TPP di bandara.

Untuk pemeriksaan TPP sendiri berdasarkan hasil pengawasan, banyak yang belum memenuhi syarat untuk area pelabuhan kecuali sebagian di wilayah kerja Indramayu. Sisanya masih belum memenuhi syarat diantaranya karena faktor konstruksi bangunan yang masih semi permanen dan banyaknya faktor risiko pencemaran di dalam bangunan TPP. Sedangkan untuk pengawasan di bandara baik di Husein Sastranegara Bandung maupun Kertajati Majalengka hasilnya semua memenuhi syarat.

7. Pengawasan Sarana Air Bersih (SAB) dan Kualitas Air Bersih

Kegiatan pengawasan Sarana Air Bersih rutin dilakukan setiap bulan di 7 (tujuh) wilayah kerja yaitu Bandara Husein Sastranegara Bandung, Pelabuhan Laut Indramayu-Balongan, Pelabuhan Laut Cirebon, Pelabuhan Laut Patimban, Palabuhanratu Sukabumi dan Bandara BIJB Kertajati Majalengka. Pengawasan SAB dilaksanakan pada SAB yang digunakan untuk distribusi di lingkungan pelabuhan dan bandara atau SAB yang digunakan untuk distribusi pada alat angkut pesawat atau kapal.





Gambar 2. 12 Kegiatan Pengawasan Sarana Air Bersih

Adapun jumlah Sarana Air Bersih yang dilakukan pengawasan di seluruh wilayah kerja KKP Kelas II Bandung dengan hasil risiko rendah didapatkan data sebagai berikut:



Grafik 2. 30 Jumlah SAB Risiko Rendah di Wilayah Kerja KKP Kelas II Bandung Tahun 2021-2023

Berdasarkan grafik diatas diketahui bahwa jumlah SAB dengan risiko rendah cenderung menurun terutama dari tahun 2022 ke tahun 2023. Hal ini disebabkan masih adanya SAB dengan hasil kandungan bakteriologi yang tidak memenuhi syarat. Penyebab tidak memenuhi syarat dari kualitas SAB bisa terjadi dari banyak faktor, diantaranya adanya cemaran di dalam jalur distribusi, kebocoran pipa.

8. Pengawasan Hygiene Sanitasi Bangunan Umum (HSBU)

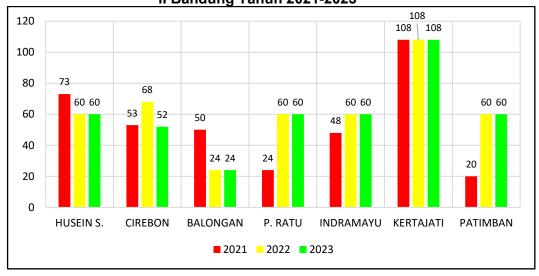
Pengawasan HSBU adalah kegiatan pengawasan yang dilakukan untuk menilai kondisi Hygiene sanitasi terhadap sarana dan prasarana umum atau Tempat-Tempat Umum (TTU) yang berada di lingkungan Pelabuhan maupun Bandara. Item Item Pemeriksaan tersebut meliputi kondisi fisik bangunan yaitu kondisi atap talang, dinding, lantai, dan tangga. Selain itu juga memeriksa kondisi pencahayaan, kebisingan, ventilasi menggunakan alat *Environtment Meter*. Hal lain yang dilakukan pengawasan adalah Tempat Cuci Tangan, Air Bersih, Toilet, Pengelolaan Sampah, Halaman Parkir, Saluran Pembuangan Air Limbah (SPAL). Dalam pengawasan ini juga termasuk pengawasan perilaku (himbauan dilarang merokok, himbauan kebersihan), pengawasan kantin dan pengawasan keberadaan binatang vektor pembawa penyakit seperti nyamuk, lalat, kecoa dan tikus.



Gambar 2. 13 Kegiatan Inspeksi Hygiene Sanitasi TTU

Adapun jumlah TTU yang dilakukan pengawasan hygiene sanitasi bangunan umum dengan rincian sebagai berikut:

Grafik 2. 31 Jumlah TTU dengan hasil pemeriksaan baik di Wilayah Kerja KKP Kelas II Bandung Tahun 2021-2023



Berdasarkan grafik di atas, terdapat persamaan pemeriksaan HSBU dengan hasil baik di tahun 2022 dan 2023. Kegiatan HSBU paling banyak dilakukan di wilayah kerja BIJB Kertajati Majalengka dan paling sedikit di wilayah kerja Balongan. Adapun mengapa di Balongan jumlahnya sedikit dikarenakan wilayah kerja Balongan merupakan bagian dari wilayah *restricted area* (area terbatas) milik BUMN Pertamina yang tidak bisa dikunjungi.

9. Pengawasan dan Pemeriksaan Sanitasi Alat Angkut (Kapal dan Pesawat)

Pengawasan dan pemeriksaan sanitasi Alat Angkut baik di bandara maupun pelabuhan dilakukan terhadap kapal dan pesawat baik kedatangan dari dalam maupun luar negeri.

Kegiatan pengawasan dan pemeriksaaan terhadap sanitasi kapal dilakukan terhadap semua alat angkut yang akan diterbitkan Surat Ijin Berlayar (SIB), baik dengan sertifikat SSCEC/SSCC berlaku ataupun tidak. Pemeriksaan kapal dilakukan di Pelabuhan Cirebon, Pelabuhan Khusus Balongan, Pelabuhan Indramayu dan Pelabuhan Palabuhanratu Sukabumi.

Kegiatan pengawasan dan pemeriksaan sanitasi pesawat dilakukan terhadap semua pesawat yang datang dari dalam maupun luar negeri. Pemeriksaan pesawat dilakukan di Bandara Husein Sastranegara Bandung dan Bandara Internasional Jawa Barat Kertajati Majalengka.



Gambar 2. 14 Pemeriksaan Sanitasi Pesawat dan Kapal

Berikut grafik yang memperlihatkan kegiatan pemeriksaan sanitasi alat angkut baik di bandara maupun pelabuhan di lingkungan wilayah kerja KKP Kelas II Bandung selama periode 2021-2023 sebagai berikut:



Grafik 2. 32 Pemeriksaan Alat Angkut di Bandara dan Pelabuhan Wilayah Kerja KKP Kelas II Bandung

Data pada grafik di atas menunjukkan adanya kenaikan pemeriksaan sanitasi kapal dan pesawat dalam 3 tahun terakhir di seluruh pelabuhan dan bandara yang diawasi oleh KKP Kelas II Bandung. Hal ini tidak lepas dari meningkatnya aktivitas perekonomian dan pariwisata secara perlahan pasca dampak pandemi Covid-19. Pada tahun ini penerbangan di bandara Kertajati yang semula di tahun 2021 dan 2022 tidak ada aktivitas penerbangan, di tahun 2023 sudah mulai melayani penerbangan baik domestik maupun internasional termasuk penerbangan haji dan umrah.

Selain kegiatan pokok di atas, Substansi Pengendalian Risiko Lingkungan juga melakukan jejaring kerja, kemitraan, kajian serta pelatihan teknis di bidang Pengendalian Risiko Lingkungan. Adapun butir kegiatannya yaitu:

a. Melakukan Monitoring Resistensi Bahan Aktif Insektisida Malathion 0,8 % terhadap Nyamuk Dewasa *Aedes spp*, di Wilayah Kerja Palabuhan Ratu Sukabumi

Uji kerentanan merupakan suatu tes untuk mengetahui tingkat kerentanan/ kekebalan nyamuk terhadap suatu insektisida. Kerentanan serangga terhadap insektisida adalah kemampuan populasi nyamuk untuk bertahan terhadap pengaruh insektisida yang biasanya mematikan. Proses seleksi peningkatan kerentanan terhadap insektisda tidak terjadi dalam waktu singkat, tetapi berlangsung lama yang diakibatkan oleh perlakuan insektisida secara terus menerus.

Uji ini bertujuan untuk menyelidiki apakah ada kekebalan atau tidak, dan kalau ada kapan timbulnya. Oleh karena itu uji ini tidak cukup hanya dilakukan sejali saja, melainkan berulang ulang sejak sebelum ada penyemprotan sampai sesudahnya. Uji

ini untuk menyelidiki kekebalan fisiologis, bukan untuk mengetahui kekuatan racun/insektisida.





Gambar 2. 15 Pelaksanaan uji resistensi nyamuk Aedes sp.

Tahap pengujian pelaksanaan uji resistensi yaitu sebagai berikut :

- Ambil nyamuk dari kurungan/ kandang nyamuk sebanyak minimal 15 ekor nyamuk betina untuk 1 paper cup. Jika terdapat 1 tube kontrol dan 3 tube pajanan, maka dibutuhkan 15 x 4 = 60 ekor nyamuk betina;
- 2) Siapkan alat WHO Susceptibility Test Kit
 - Tabung penyimpanan (holding tube) ditandai warna hijau dilapisi dengan kertas putih yang bersih (tanpa insektisida)
 - Tabung Pajanan (Exposure Tube) ditandai dengan warna merah;
 - Tabung Kontrol (*Control Tube*) ditandai dengan warna kuning;
 - Impregnated Paper Konsentrasi Aedes yaitu malathion 0,8 %
- 3) Masukkan nyamuk dalam tabung holding tube selama 1 jam. Setelah 1 jam, hitung dan catat jumlah nyamuk yang pingsan dan mati (tidak diikutkan dalam uji);
- 4) Pindahkan dengan hati hati ke tabung *exposurel* perlakuan. Kontakkan nyamuk dengan insektisida selama 1 jam;
- 5) Untuk bahan aktif yang bersifat *knock down* (melumpuhkan) lakukan pengamatan jumlah nyamuk setiap 5, 10, 15, 20, 30 dan 60 menit;
- 6) Setelah selesai dikontakkan selama 1 jam, pindahkan kembali nyamuk ke tabung holding. Diamkan selama 24 jam.
- 7) Catat jumlah nyamuk yang mati.

Dari jumlah nyamuk sebanyak 60 ekor dari 3 uji, diperoleh kematian nyamuk sebanyak 45 ekor. Maka angka kematian nyamuk adalah 45/45 ekor = 100%. Dengan hasil kematian nyamuk uji sebesar 100%, maka kesimpulan hasil uji nyamuk dalam kategori **rentan** (kematian di atas 98%).

Dengan hasil ini dapat disimpulkan bahwa nyamuk masih rentan terhadap insektisida Malathion dan golongan Organofosfat lainnya dan masih bisa digunkana untuk pengendalian vektor DBD di wilayah kerja Palabuhanratu Sukabumi.

b. Terlibat dalam Kegiatan *Pilot Project* Implementasi Nyamuk Aedes berWolbachia yang diselenggarakan oleh Direktorat P2PM Ditjen P2P Kemenkes RI

Kegiatan ini merupakan perwujudan dari Keputusan Menteri Kesehatan No.HK.01.07/Menkes/1341/2022 terkait *Pilot Project* Implementasi Nyamuk Aedes aegypti berwolbachia. Proyek ini diimplementasikan di Kota Semarang, Kota Administrasi Jakarta Barat, Kota Bandung, Kota Kupang dan Kota Bontang. Sebelumnya, uji coba penyebaran nyamuk ber-Wolbachia ini telah dilakukan di Kota Yogyakarta dan Kabupaten Bantul. Hasilnya terbukti mampu menekan kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) hingga 77 persen dan menurunkan proporsi dirawat di rumah sakit sebesar 86 persen.

Proyek ini bertujuan utama untuk menurunkan penyebaran penyakit Demam Berdarah Dengue. Bakteri Wolbachia ini dalam tubuh nyamuk mampu menghambat replikasi virus Dengue. Di Kota Bandung sendiri, kegiatan implementasi ini dilaksanakan di wilayah Kecamatan Ujung Berung yang merupakan penyumbang kasus terbesar DBD di Kota Bandung. Dalam implementasinya, proyek ini melibatkan berbagai pihak mulai dari World Mosquito Program, Kemenkes dari Direktorat P2PM, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, Dinas Kesehatan Kota Bandung, Pemerintah Kota, Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP), Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan (BBTKL) hingga Perguruan Tinggi dan masyarakat sebagai Koordinator Lapangan dan kader dan orang tua asuh di program implementasi ini.

Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Bandung sendiri dalam program ini terlibat sebagai tenaga identifikator untuk proses evaluasi program. Dimana dalam kurun waktu tertentu yang telah ditentukan, nyamuk Aedes ber-Wolbachia di lapangan akan ditangkap untuk diteliti sejauh mana perkembangan wolbachia. Program ini akan berhenti dan berpindah ke lokasi lain apabila jumlah nyamuk Aedes ber-wolbachia di lokasi tersebut sudah stabil di persentasi 60%.





Gambar 2. 16 Pelaksaaan Implementasi Nyamuk Aedes Ber-Wolbachia

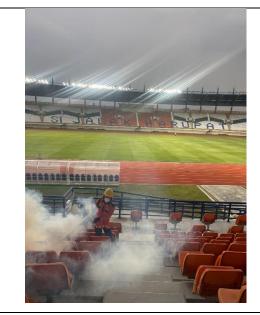
c. Terlibat dalam Kegiatan Pengendalian Faktor Risiko Lingkungan situasi khusus Piala Dunia Sepak Bola U-17

Indonesia ditunjuk sebagai tuan rumah penyelenggaraan Piala Dunia Sepak Bola U-17 yang diselenggarakan mulai tanggal 10 November s.d. 2 Desember 2023 di empat kota, yaitu Bandung, Jakarta, Solo dan Surabaya. Di Bandung sendiri perhelatan pertandingan dilangsungkan di Stadion Si Jalak Harupat Kabupaten Bandung dan tempat latihan di beberapa lapangan di Kota Bandung dan Kabupaten Sumedang.

Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Bandung mendapatkan tugas pengendalian faktor risiko lingkungan di lingkungan venue utama dan venue latihan atlet menjelang event dimulai. Kegiatan pengendalian faktor risiko lingkungan ini meliputi survei vektor nyamuk, kecoa, lalat, dan tikus serta tindakan pengendalian nyamuk dengan fogging dan spraying dengan mesin ULV (*Ultra Low Volume*) di venue utama.









Gambar 2. 17 Pelaksanaan Pengendalian Faktor Risiko Lingkungan Piala Dunia U-17

d. Terlibat dalam Kegiatan Program Surveilans dan Pengendalian Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit yang diselenggarakan Tim Kerja Pengendalian Vektor Direktorat Surveilans dan Kekarantinaan Kesehatan Ditjen P2P Kemenkes RI

Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Bandung terlibat dalam program dari Direktorat Surveilans dan Kekarantinaan Kesehatan Ditjen P2P Kemenkes RI untuk melaksanakan program sentinel surveilans dan pengendalian vektor leptospirosis dan Aedes ber-wolbachia di Jawa Barat yang dilaksanakan tanggal 19-22 September 2023. Adapun daerah yang dijadikan lokasi sentinel yaitu Kota Bandung untuk nyamuk Aedes Ber-Wolbachia, dan Kab. Tasikmalaya, Kab. Ciamis dan Kab. Pangandaran untuk sentinel leptospirosis.

Selain itu beberapa pegawai KKP Kelas II Bandung juga dilibatkan kegiatan ini untuk ditugaskan ke daerah lain, diantaranya sentinel leptospirosis di Jawa Timur (Kabupaten dan Kota Probolinggo), Nusa Tenggara Timur (Kota Kupang), serta Bangka Belitung.



Gambar 2. 18 Surveilans Sentinel Leptospirosis di Jawa Barat





BAB III

DUKUNGAN TEKNIS KKP KELAS II BANDUNG

Berdasarkan Permenkes Nomor 77 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Subbagian administrasi umum mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana, dan hubungan masyarakat, pengelolaan data dan informasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, kearsipan, persuratan, dan kerumahtanggaan KKP kelas II Bandung. Adapun Kegitatan-kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2022 diantaranya adalah sebagai berikut:

A. Kepegawaian

Tugas Sub Bagian Administrasi Umum di bidang kepegawaian antara lain mencakup pengangkatan ASN, Kenaikan Pangkat, Promosi Jabatan, Mutasi PNS, Pendidikan dan Pelatihan, Pengurusan Kenaikan Gaji Berkala, Usulan Pensiun, Usulan Jabatan Fungsional Tertentu dan lain-lain.

Untuk memudahkan pelaksanaan proses kepegawaian Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Bandung menggunakan beberapa Aplikasi diantaranya :

- a. Aplikasi Absensi (Internal KKP Bandung);
- b. Aplikasi online Portal E Office Biro Kepegawaian Kemenkes RI yang sudah mencakup beberapa menu kepegawaian seperti layanan SDM, Verifikasi Pemutakhiran Data Mandiri, penghargaan, PDM Dokumen, registrasi tugas belajar, kinerja, program kompetensi dan lainlain:
- c. Aplikasi cuti / perizinan (Internal KKP Bandung);
- d. Aplikasi arsip pelatihan (Internal KKP Bandung).

Penyusunan dan penetapan kebutuhan pegawai disusun oleh Analis Kepegawaian pada Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Bandung dan sebagai hasilnya Alokasi pegawai pada Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Bandung pada tahun 2023 adalah sebagai berikut :

- a. Jumlah pegawai sampai dengan Desember 2023 sebanyak : 74 orang
- b. Jumlah pegawai mutasi masuk untuk tahun 2023 sebanyak : 0 orang
- c. Jumlah pegawai mutasi keluar tahun 2023 sebanyak : 1 orang
- d. Jumlah CPNS tahun 2023 sebanyak : 0 orang
- e. Jumlah PPPK tahun 2023 sebanyak : 2 orang
- f. Jumlah CPNS mengundurkan diri sebanyak : 0 orang
- g. Jumlah Pensiun karena meninggal dunia sebanyak : 0 orang

- h. Jumlah Pegawai Pensiun sebanyak: 0 orang
- i. Jumlah PPNPN sampai dengan Desember 2023 sebanyak : 19 orang

Sedangkan untuk Penempatan Pegawai di masing-masing wilker yang ada pada KKP Kelas II Bandung adalah sebagai berikut :

Tabel 3. 1 Alokasi Pegawai di Induk dan Wilker KKP Kelas II Bandung

No	Induk / Wilker	PNS	PPPK	PPNPN	Jumlah
1	Induk	37	0	6	43
2	Wilker Cirebon	11	0	2	13
3	Wilker Pelabuhan Khusus Indramayu Balongan	6	0	1	7
4	Wilker Pelabuhanratu	2	0	3	5
5	Pos Bandara Kertajati	11	1	2	14
6	Pos Pelabuhan Patimban	2	1	2	5
7	Pos Bandara Husein Sastranegara Bandung	3	0	3	6

1. Distribusi PNS

Distribusi PNS pada Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Bandung Tahun 2021 -2023 menurut jenis tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

menurut jenis tingkat pendidikan **DATA KEPEGAWAIAN MENURUT TINGKAT** 40 35 30 **P**25 **P**20 **P**15 10 0 S 5> **TINGKAT** 2021 **2022**

Grafik 3. 1 Distribusi PNS Periode Tahun 2021 – 2023

Dari grafik di atas, dapat dilihat bahwa pada tahun 2021 pegawai dengan tingkat pendidikan Diploma 1 mengalami pengurangan 1 (satu) orang pegawai, perubahan ini dikarenakan pegawai pensiun.

Sedangkan di tingkat pendidikan Diploma III mengalami penambahan dari tahun 2021 - 2023, perubahan disebabkan adanya penerimaan CPNS dan terdapat mutasi pegawai ke dalam dan keluar KKP Bandung.

Dan juga terdapat pertumbuhan dari tingkat pendidikan Sarjana pada tahun 2021 – 2023, perubahan disebabkan minat pegawai untuk menempuh pendidikan lebih tinggi dan terdapat mutasi pegawai ke dalam dan keluar KKP Bandung. Adapun di tahun 2021 pegawai dengan tingkat pendidikan Sarjana mengalami pengurangan dikarenakan pegawai menempuh pendidikan pasca sarjana.

Pada tahun 2021 untuk tingkat pendidikan kedokteran mengalami penambahan dikarenakan terdapat CPNS dengan pendidikan Dokter Umum. Sedangkan untuk pendidikan pasca sarjana di tahun 2021 -2023 mengalami penambahan dikarenakan pegawai dengan tingkat pendidikan S1 sudah menyelesaikan pendidikan pasca sarjana.

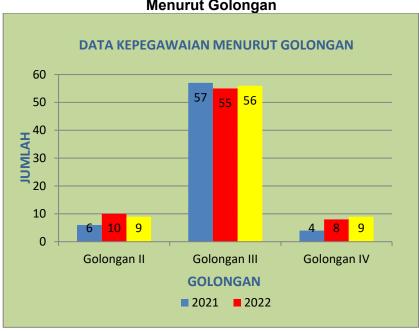
Data Kepegawaian Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Bandung tahun 2021 - 2023 menurut jenis kelamin dapat dilihat pada grafik sebagai berikut :



Grafik 3. 2 Data Kepegawaian Periode Tahun 2021 - 2023 menurut jenis kelamin

Dari grafik di atas, terlihat bahwa terdapat penambahan pegawai berjenis kelamin laki laki pada tahun 2022 sebanyak 3 (tiga) orang dan pegawai perempuan sebanyak 3 (tiga) orang dikarenakan adanya penerimaan CPNS dan pada tahun 2023 terdapat penambahan pegawai berjenis kelamin perempuan sebanyak 1 (satu) orang pegawai dan berjenis kelamin laki laki 1(satu) orang dikarenakan adanya penerimaan PPPK dan ada 1 (satu) pegawai perempuan yang mutasi keluar. Data Kepegawaian Kantor Kesehatan

Pelabuhan Kelas II Bandung tahun 2021 – 2023 menurut golongan dapat dilihat pada grafik sebagai berikut:

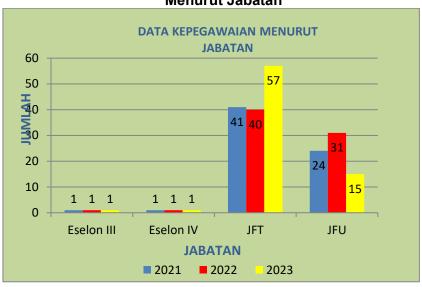


Grafik 3. 3 Data Kepegawaian Periode Tahun 2021 - 2023 Menurut Golongan

Dari grafik di atas, dapat dilihat bahwa pada tahun 2022 terdapat penambahan pegawai dengan golongan II sebanyak 4 orang, dan mengalami pengurangan di tahun 2023 sebanyak 1 orang. Sedangkan pegawai dengan golongan III mengalami penurunan sebanyak 2 (dua) orang pegawai, dan di tahun 2023 mengalami penambahan 1 orang pegawai, perubahan ini dikarenakan pegawai dengan golongan II naik golongan menjadi golongan III dan adanya mutasi masuk dan keluar dari KKP Kelas II Bandung. Sedangkan pada tahun 2023 pegawai dengan Golongan IV bertambah 1 (satu) orang pegawai dikarenakan adanya kenaikan golongan dari golongan III.

2. Jabatan Fungsional

Data pegawai Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Bandung menurut jabatan yang dimiliki dari tahun 2021 – 2023 dapat dilihat dari diagram berikut :



Grafik 3. 4 Data Kepegawaian periode tahun 2021- 2023 Menurut Jabatan

Dari grafik di atas, terlihat bahwa pada tahun 2021 sd 2023 jabatan Eselon III dan Eselon IV tetap 2 (dua) orang hal ini dikarenakan pegawai dengan jabatan eselon IV beralih menjadi JFT, dan untuk Kepala Kantor (Eselon III) dan Kepala Sub Bagian Administrasi Umum (Eselon IV) termasuk Kedalam Jabatan Adminstrasi. Sedangkan pada JFT dari tahun 2021-2023 mengalami penambahan sebanyak 17 (tujuh belas) pegawai hal ini disebabkan pegawai dengan jabatan JFU di arahkan untuk menjadi JFT baik melalui jalur inpassing maupun melalui jalur alih jabatan/reguler.

B. Barang Milik Negara

Barang adalah bagian dari kekayaan negara yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai/dihitung/diukur/ditimbang dan dinilai tidak termasuk uang dan surat berharga. Menurut Undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Barang Milik Negara (BMN) adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. BMN memiliki jenis dan variasi yang sangat beragam, baik dalam hal tujuan perolehannya maupun masa manfaat yang diharapkan.

1. Barang Tidak Bergerak

Aset tidak bergerak di Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Bandung per 31 Desember 2023 berupa Tanah, Bangunan Gedung Kantor Permanen, Rumah Negara, Alat Besar, Alat Kedokteran dan Kesehatan. KKP Kelas II Bandung memiliki sarana prasarana barang tidak bergerak berupa tanah seluas 5.973 m2 dan bangunan seluas 3.594 m2. Kuantitas luas tanah dan bangunan berdasarkan lokasi dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3. 2 Kuantitas Luas Tanah dan Bangunan berdasarkan lokasi di KKP Bandung Per 31 Desember 2023

NO	URAIAN	KUANTITAS PER 31 DESEMBER 2023	KETERANGAN	
1	Tanah			
	a. Tanah bangunan rumah negara golongan II (Cirebon)	200 m²		
	b. Tanah Bangunan Kantor Pemerintah untuk Wilker Indramayu	528 m²		
	c. Tanah Bangunan Kantor Pemerintah untuk Wilker Cirebon	1.000 m²		
	d. Tanah Bangunan Kantor Pemerintah untuk Wilker Majalengka	1.626 m²		
	e. Tanah Bangunan Kantor Pemerintah untuk Wilker Pelabuhan Ratu	1.060 m²		
	f. Tanah Bangunan Kantor Pemerintah untuk Induk (Cikapayang)	780 m²		
	g. TanahBangunan Kantor Pemerintah untuk Wilker Patimban	779 m²		
2	Gedung dan Bangunan			
	a. Bangunan Gedung Kantor Permanen Wilker Cirebon	212 m²		
	b. Bangunan Gedung Garasi di Wilker Cirebon	80 m²		
	c. Rumah Negara di Cirebon Gol II Tipe A Permanen di Cirebon	130 m²		
	d. Bangunan Gedung Kantor Permanen Induk (Cikapayang)	1.529 m²		
	e. Bangunan Gedung Kantor Permanen Wilker Cirebon	615 m²		
	f. Bangunan Gedung Kantor Permanen Wilker Indramayu	309 m²		
	g. Bangunan Gedung Kantor Permanen Wilker Pelabuhan Ratu	305 m²		
	h. Bangunan Gedung Kantor Permanen Wilker Kertajati	414 m²		

2. Barang Bergerak

Sarana prasarana berupa barang bergerak di Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Bandung per 31 Desember 2023 yang digunakan dalam operasional kantor sebanyak 49 unit yang terdiri dari 29 unit kendaraan bermotor roda 4 (empat) dan 20 unit kendaraan bermotor roda 2 (dua) yang mana pada tahun 2023 mengalami penambahan yaitu kendaraan bermotor roda 4 (empat) berupa Mini Bus.

Tabel 3. 3 Jenis dan Jumlah Barang Bergerak di KKP Bandung Per 31 Desember 2023

NO	URAIAN	KUANTITAS PER 31 DESEMBER 2023	KETERANGAN		
1	Roda 4 (Empat)				
	a. Minibus	13 unit			
	b. Pick up	4 unit			
	c. Ambulance	10 unit			
	d. Mobil Rontgen	1 unit			
2	Roda 2 (Dua)				
	a. Sepeda Motor	20 unit			

Berdasarkan lokasi, jenis dan jumlah barang bergerak sampai dengan 31 Desember 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3. 4 Jenis, Jumlah dan Lokasi Barang Bergerak di KKP Bandung Per 31 Desember 2023

	LOKASI	JENIS KENDARAAN					
NO		RODA EMPAT				RODA	JUMLAH
		MINI BUS	AMBULANCE	PICKUP	MOBIL RONTGEN	DUA	JUMLAH 30 7
1	Kantor Induk (Bandung)	11	3	3	0	13	30
2	Wilker Cirebon	1	2	1	1	2	7
3	Wilker Indramayu Balongan	1	1	0	0	2	4

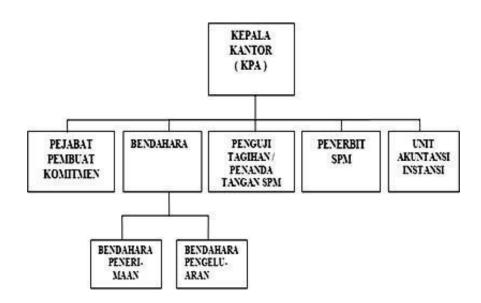
4	Wilker Pelabuhan Ratu	0	1	0	0	1	2
5	Wilker Kertajati	0	2	0	0	2	4
6	Bandara Husein	0	1	0	0	0	1
7	Wilker Patimban	0	1	0	0	0	1
	JUMLAH		10	4	1	20	49

C. Keuangan

Anggaran disusun dan dikelola berdasarkan rencana kebutuhan yang ada serta dengan mempertimbangkan pagu anggaran yang tersedia dan juga tidak terlepas dari peraturan perundangan yang berlaku.

1. Struktur Pengelola Keuangan

Pelaksanaan pengelolaan keuangan dilaksanakan dengan membentuk unit pengelola keuangan di KKP Kelas II Bandung sebagaimana terlihat pada Gambar di bawah ini.



Gambar 3. 1 Struktur Pengelola Keuangan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Bandung Tahun 2023

Sumber dana Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Bandung berasal dari APBN Kementerian Kesehatan RI Tahun 2023, pada awal tahun KKP Kelas II Bandung memperoleh

dana sebesar Rp. 26.918.996.000,- (DIPA No. SP DIPA- 024.05.2.415712/2023). Namun pada tahun berjalan adanya efisiensi pada anggaran yang bersumber dari RM sebesar Rp. 182.022.000,- sehingga Pagu terakhir s.d Desember 2023 sebesar Rp. 26.732.974.000,-. Anggaran DIPA KKP Kelas II Bandung mengalami revisi DIPA sampai dengan 11 (Sebelas) kali, yaitu:

a. DIPA Revisi 0

DIPA KKP Bandung Revisi I terbit pada tanggal 26 Desember 2022 dikarenakan adanya pergeseran dalam satu keluaran, satu kegiatan, satu satker, serta adanya penyesuaian Rencana Penarikan Dana atau Rencana Penerimaan dalam halaman III DIPA.

b. DIPA Revisi I

DIPA KKP Bandung Revisi II (Kanwil) terbit pada tanggal 7 Februari 2023 dikarenakan adanya pergeseran dalam satu keluaran, satu kegiatan, satu satker, serta adanya penyesuaian Rencana Penarikan Dana atau Rencana Penerimaan dalam halaman III DIPA.

c. DIPA Revisi II

DIPA KKP Bandung Revisi III (Kanwil) terbit pada tanggal 12 April 2023 dikarenakan adanya pergeseran dalam satu keluaran, satu kegiatan, satu satker, serta adanya penyesuaian Rencana Penarikan Dana atau Rencana Penerimaan dalam halaman III DIPA.

d. DIPA Revisi III

DIPA KKP Bandung Revisi IV (Kanwil) terbit pada tanggal 14 Juli 2023 dikarenakan adanya pergeseran dalam satu keluaran, satu kegiatan, satu satker, serta adanya penyesuaian Rencana Penarikan Dana atau Rencana Penerimaan dalam halaman III DIPA.

e. DIPA Revisi IV

DIPA KKP Bandung Revisi V (DJA) terbit pada tanggal 18 Juli 2023 dikarenakan adanya revisi anggaran dalam hal pagu anggaran berubah, realokasi belanja pegawai bersumber blokir Automatic Adjustment sebesar Rp119.011.468.000,00 ke Anggaran Bendahara Umum Negara (BUN), penyesuaian Rencana Penarikan Dana atau Rencana Penerimaan dalam halaman III DIPA, dan perubahan halaman IV DIPA.

f. DIPA Revisi V

DIPA KKP Bandung Revisi VI (Kanwil) terbit pada tanggal 21 Juli 2023 dikarenakan adanya pergeseran dalam satu keluaran, satu kegiatan, satu satker, serta

adanya penyesuaian Rencana Penarikan Dana atau Rencana Penerimaan dalam halaman III DIPA.

g. DIPA Revisi VI

DIPA KKP Bandung Revisi VII (DJA) terbit pada tanggal 20 Agustus 2023 dikarenakan adanya Usulan Revisi Anggaran Pemanfaatan Automatic Adjustment (AA) dan Revisi Anggaran Kementerian Kesehatan TA 2023.

h. DIPA Revisi VII

DIPA KKP Bandung Revisi VIII (Kanwil) terbit pada tanggal 13 Oktober 2023 dikarenakan adanya pergeseran dalam satu keluaran, satu kegiatan, satu satker, serta revisi Rencana Penarikan Dana atau Rencana Penerimaan dalam halaman III DIPA.

i. DIPA Revisi VIII

DIPA KKP Bandung Revisi IX (DJA) terbit pada tanggal 30 Oktober 2023 dikarenakan adanya Usulan Revisi Anggaran Sekretariat Jenderal, Ditjen P2P dan Ditjen Tenaga Kesehatan TA 2023 berupa penambahan gaji PNS dan P3K.

j. DIPA Revisi IX

DIPA KKP Bandung Revisi X (Kanwil) terbit pada tanggal 24 November 2023 dikarenakan adanya pergeseran dalam satu keluaran, satu kegiatan, satu satker, penambahan volume RO, serta revisi Rencana Penarikan Dana atau Rencana Penerimaan dalam halaman III DIPA.

k. DIPA Revisi X

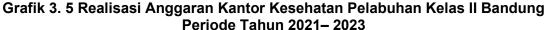
DIPA KKP Bandung Revisi XI (Kanwil) terbit pada tanggal 28 Desember 2023 dikarenakan adanya pergeseran dalam satu keluaran, satu kegiatan, satu satker serta revisi Rencana Penarikan Dana atau Rencana Penerimaan dalam halaman III DIPA.

Sumber dana Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Bandung berasal dari APBN Kementerian Kesehatan RI Tahun 2023. Pengelolaan keuangan terdiri dari 2 macam, yaitu:

a. Rupiah Murni (RM)

b. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Anggaran KKP Kelas II Bandung pada tahun 2023 bersumber dari DIPA Tahun 2023 sebesar Rp 26.732.974.000,- dengan realisasi penggunaan anggaran sebesar 92,60 % atau Rp 24.755.731.273,-Realisasi anggaran KKP Kelas II Bandung dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 dapat digambarkan pada grafik berikut .





Grafik 3. 6 Persentase Realisasi Anggaran KKP Kelas II Bandung Periode Tahun 2020 – 2023



Dari Grafik di atas dapat disimpulkan bahwa Realisasi Belanja pada tahun 2023 mengalami penurunan realisasi dikarenakan telah terjadi efisiensi penggunaan sumber daya di lingkungan KKP Kelas II Bandung dimana pelaksanaan kegiatan yang anggarannya terefisiensi dilakukan upaya bergabung dengan kegiatan lain sehingga mampu mencapai target kinerja maupun output fisik dengan anggaran dan sumber daya manusia terbatas. Selain itu, kegiatan monev dan bimtek ke wilker dilaksanakan secara terpadu sehingga dapat menghemat anggaran.



BAB IV PENUTUP

Profil Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Bandung tahun 2023 memberikan gambaran/ informasi kepada pembaca tentang kegiatan dan hasilnya pada tahun yang bersangkutan atau perbandingan/trend dengan tahun sebelumnya. Kegiatan evaluasi yang dilaksanakan juga berdasarkan tugas pokok dan fungsi Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kelas II Bandung yang tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 33 tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan dan sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 1250/Menkes/SK/VIII/2005 tentang susunan jabatan dan uraian kegiatan Kantor Kesehatan Pelabuhan dimana dalam menjalankan fungsinya, ketatausahaan di lingkungan KKP Kelas II Bandung harus mampu melakukan penyusunan program, pengelolaan informasi, evaluasi dan laporan.

Berdasarkan Permenkes No 10 Tahun 2023 "Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekarantinaan Kesehatan" dan Peraturan Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit nomor OT.01.01/C/2174/2023 tentang tindak lanjut terbitnya Permenkes nomor 10 tahun 2023 Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Bandung berganti nama menjadi **Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Bandung** terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun 2024.

Demikian Profil Tahun 2023 Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Bandung tahun 2023 ini dibuat dengan harapan profil ini dapat menjadi informasi dalam membuat perencanaan serta untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap program dan kegiatan yang akan datang.

LAMPIRAN



Kantor Induk (Bandung)



Wilker Cirebon



Wilker Indramayu & Balongan



Wilker Palabuhanratu Sukabumi



Pos Bandara internasional Jawa Barat - Kertajati Majalengka



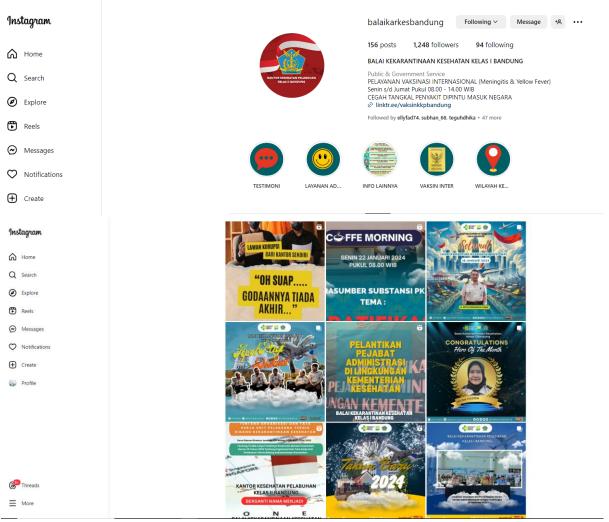
Kantor Pos Pelabuhan Patimban Subang



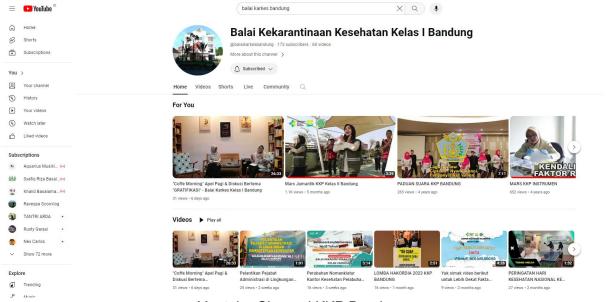
Pos Bandara Husein Sastranegara Bandung



Website KKP Bandung http:// https://balaikarkesbandung.kemkes.go.id//



Instagram KKP Bandung



Youtube Channel KKP Bandung